



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018
TGL 22 MEI 2018**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2017-2022**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan. RenstraDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2017-2022.

Dokumen RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJD,RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat.

Renstra OPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolok ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penyusunan Renstra ini.

Akhir kata semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam mendukung

pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yakni Sulawesi Barat Maju dan
Malaqbiq.

Mamuju, Desember 2017
Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Barat



Ir. H. PARMAN PARAKKASI, M.Sc
NIP. 19691212 199403 1 004

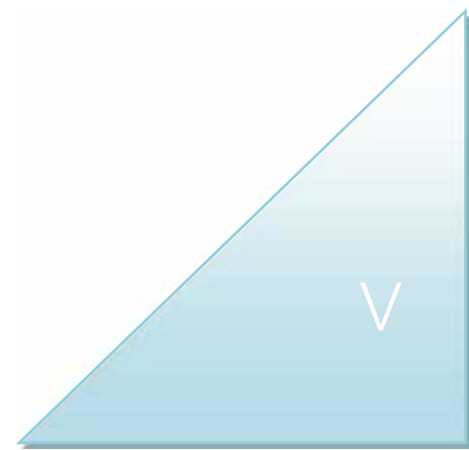
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	31
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L).....	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
BAB VPENUTUP	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2017	19
Tabel 2. Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Eselon.....	19
Tabel 3 Inventaris/Peralatan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.....	20
Tabel 4. Kendaraan Dinas	21
Tabel 5. Data Potensi Budidaya Air Payau Provinsi Sulawesi Barat.....	22
Tabel 6. Data Potensi Budidaya Laut Provinsi Sulawesi Barat.....	23
Tabel 7. Data Potensi Budidaya Air Tawar Provinsi Sulawesi Barat.....	23
Tabel 8. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan sumberdaya ikan Provinsi Sulawesi Barat	25
Tabel 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016.....	27
Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016.....	28
Tabel 11. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.....	32
Tabel 12. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pencapaian Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.....	35
Tabel 13. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan Perikanan	38
Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	42
Tabel 15. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	47
Tabel 16. Penilaian Isu Strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala	48
Tabel 17. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.....	49
Tabel 18. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.....	52

Tabel 19. Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.....	56
Tabel 20. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Antara RPJPD, RPJMD dan Renstra di Tingkat Pusat dan Daerah.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	18
Gambar 3. Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016.....	24
Gambar 4. Luasan (ha) Areal Perikanan Budidaya di Sulawesi Barat.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.....	63
Lampiran 2 Anggaran Program/Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.....	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 tahun 2015, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) Tahun yang berfungsi untuk merencanakan perubahan kearah yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas penggunaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas organisasi.

Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra-PD memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

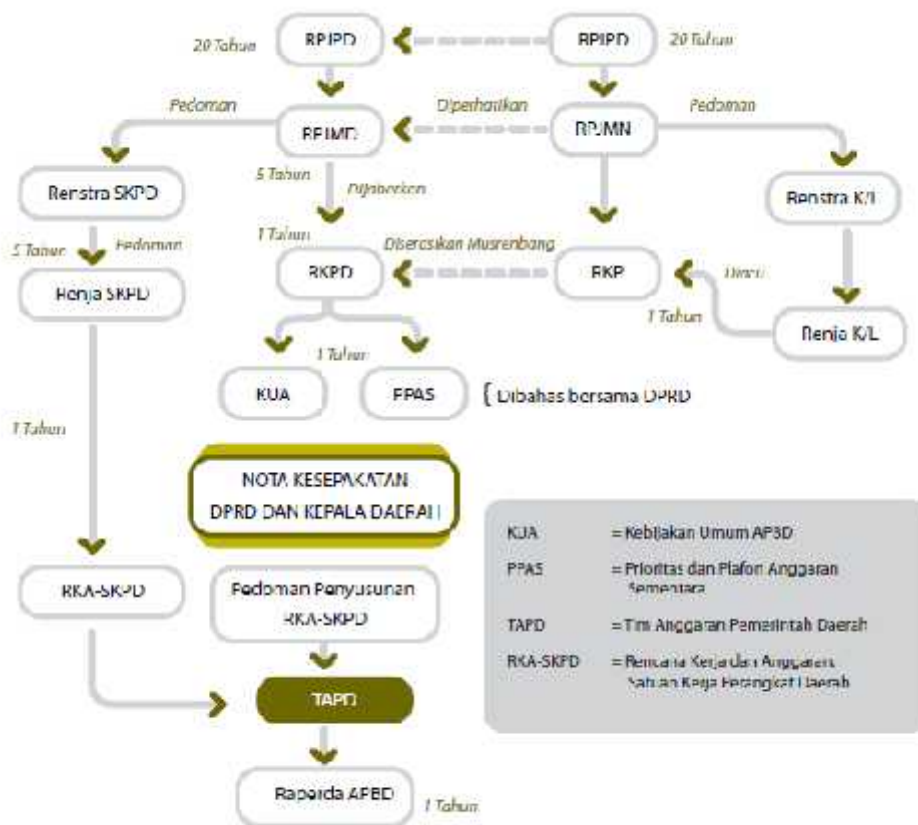
Proses penyusunan Renstra-PD sesuai dengan tahapan dalam pelaksanaan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut.: meliputi: (1) persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra-PD mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan

Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Antara dokumen-dokumen perencanaan harus saling terkait, dimana dokumen yang lebih teknis (jangka pendek) mengikuti atau memperhatikan dokumen yang lebih bersifat strategis (jangkapanjang). Dokumen daerah harus memperhatikan dokumen tingkat nasional. Hubungan antara RPJPD, RPJMD dan Rencana Strategis Daerah di tingkat pusat dan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Hubungan Antara RPJPD, RPJMD dan Renstra di Tingkat Pusat dan Daerah



Sumber: UU No. 2 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri 54 Tahun 2010 (diolah)

Sektor kelautan dan perikanan merupakan bagian dari pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Barat dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan diperlukan langkah-langkah terobosan yang tak terpisahkan dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan menuju Sulawesi Barat maju dan *malaqbiq*. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Renstra Tahun 2017-2022 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan kelautan dan perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Dengan berakhirnya periode pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016, maka dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2017-2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Secara normatif, kekayaan sumberdaya kelautan dan pesisir dikuasai oleh negara. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki hak untuk mengelola kawasan perairan yuridiksi hingga batas 12 mil dari garis pantai. Terkait dengan pemanfaatannya, diperlukan suatu acuan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan. Ruang lingkup Renstra Kelautan dan Perikanan ini mencakup aspek pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat, yang mencakup pengelolaan, pemanfaatan, penguasaan, pemeliharaan dan pengawasan atau pengendalian serta penguatan hilirisasi sumberdaya kelautan dan perikanan menuju terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berdaya saing tinggi, memiliki nilai komperatif, inovatif dan penuh kreatifitas, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan *income* masyarakat nelayan (secara umum) untuk Sulawesi Barat maju dan *malaqbiq*.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015;
4. Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 – 2015;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2037;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan: (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, (3) sebagai dasar bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat adalah menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan Kelautan

dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dan program kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, mengulas secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki, mengemukakan tingkat capaian kinerja perangkat daerah yang telah dihasilkan, serta mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Perangkat, mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah terhadap RTRW dan KLHS, serta menyajikan metode dan penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani

BAB IV : Tujuan Dan Sasaran

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan

Menyajikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah yang selanjutnya disingkat DKP, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. DKP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan, Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan meliputi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kelautan dan perikanan meliputi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengkoordinasian dan Pembinaan UPTD;
- e. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2.1.3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (Dua) UPT terdiri :

1. Bidang Perikanan Tangkap, dan Tata Ruang Kelautan;
2. Bidang Perikanan Budidaya;
3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan/Udang Poniang
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Palipi Nasional (PPN Palipi)
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Ikan Air Tawar Tamalantik

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya, Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program dan pelaporan. UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Belum memiliki pejabat yang menempati seksi yang yg ada.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Tugas Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas Kelautan dan Perikanan.

-
2. Fungsi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - c. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. Koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 3. Sekretariat membawahi tiga (3) sub bagian:
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- B. Tugas dan Fungsi Bidang Perikanan Budidaya
1. Tugas Bidang Perikanan Budidaya adalah melaksanakan produksi budidaya, sarana prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan.
 2. Fungsi Bidang Perikanan Budidaya adalah :
 - a. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin biofarmakologi laut;
 - b. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin bioteknologi laut;
 - c. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pemanfaatan air laut;
 - d. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin usaha perikanan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pengawasan pembudidaya ikan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perikanan budi daya;
 - g. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan perikanan budi daya;
 - h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, Standardisasi dan pelaksanaan fasilitas transformasi teknologi budidaya laut, payau dan air tawar;

-
- i. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan Pengendalian budi daya air tawar, payau dan laut;
 - j. Pelaksanaan pembinaan pengaturan sarana dan prasarana budi daya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris;
 - l. Pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas tiga(3) seksi:
 - a. Seksi Produksi Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- C. Tugas dan Fungsi Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan
1. Tugas Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan adalah melaksanakan produksi penangkapan ikan, sarana dan prasarana penangkapan ikan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
 2. Fungsi Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan adalah :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan tata ruang kelautan;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya ikan standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan sumber daya ikan standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sumberdaya ikan standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;
 - g. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan tata ruang laut kewenangan provinsi, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
 - h. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
 - i. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan tata ruang laut kewenangan provinsi, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan;
 - k. Pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan terdiri atas tiga(3) seksi:
- a. Seksi Produksi Penangkapan Ikan

- b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
 - c. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- D. Tugas dan Fungsi Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
1. Tugas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan Distribusi dan Pemasaran, Pembinaan dan Pengolahan Mutu Produk, Kemitraan Usaha, Investasi dan Promosi
 2. Fungsi Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas tiga(3) seksi:
 - a. Seksi Distribusi dan Pemasaran

- b. Seksi Pembinaan dan Pengolahan Mutu produk
 - c. Seksi Kemitraan Usaha, Investasi dan Promosi
- E. Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1. Tugas Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengendalian Lingkungan, pengawasan dan Penegakan Hukum.
 2. Fungsi Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
 - c. Pengkajian bahan fasilitasi pengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. Pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data pengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
 - e. Penyusunan program kerja bidang pengawasan, pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi unit kerja terkait; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 3. Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas Tiga (3) seksi :
 - a. Seksi Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - b. Seksi Konservasi dan Pengendalian Lingkungan
 - c. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum

F. Tugas dan Fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi

1. Tugas UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi adalah melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah kerjanya serta memanfaatkan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya.
2. Fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi adalah :
 - a. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - b. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - f. Pelaksanaan kesyahbandaran;
 - g. Pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - h. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k3), kebakaran dan pencemaran); dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran
 - c. Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran

G. Tugas dan Fungsi UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang

1. Tugas UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dibidang teknis pengelolaan, pelaksanaan perbenihan dan budidaya ikan.
2. Fungsi UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang adalah :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan budidaya ikan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat;
 - d. Penyediaan benih dan calon induk ikan unggul;
 - e. Pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan;
 - f. Penyediaan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
 - g. Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan;

- h. Pelaksanaan sertifikasi benih dan induk ikan unggul;
 - i. Pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan pengembangan budidaya ikan;
 - j. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas;
 - k. Pengelolaan ketatausahaan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Produksi, Peningkatan Mutu dan Standarisasi Benih
 - c. Seksi Informasi dan Pemasaran
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- H. Tugas dan Fungsi UPTD Balai Benih Budidaya Air Tawar (B3AT) Tamalantik
1. Tugas UPTD Balai Benih Budidaya Air Tawar (B3AT) Tamalantik adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dibidang teknis pengelolaan, pelaksanaan perbenihan dan budidaya Air Tawar.
2. Fungsi UPTD Balai Benih Budidaya Air Tawar (B3AT) Tamalantik adalah :
- a. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya air tawar;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan budidaya air tawar;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya air tawar milik rakyat;
 - d. Penyediaan benih dan air tawar;
 - e. Pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya airtawar;
 - f. Pelaksanaan sertifikasi benih dan budidaya air tawar;
 - g. Pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan pengembangan budidaya air tawar;
 - h. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas;
 - i. Pengelolaan kesekretariatan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
3. UPTD Balai Benih Budidaya Air Tawar (B3AT) Tamalantik terdiri atas :
- a. Subbagian tata usaha
 - b. Seksi produksi, peningkatan mutu dan standarisasi benih
 - c. Seksi informasi dan pemasaran

d. Kelompok jabatan fungsional

Untuk jelasnya struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan operasionalnya, hingga tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan dijalankan oleh 86 orang pegawai. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 14 orang; pendidikan S1 sebanyak 53 orang, pendidikan D1/D3 sebanyak 6 orang, sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 13 orang. Dilihat dari Eselon, dari 86 orang terdiri dari Eselon IV sebanyak 18 orang, Eselon III sebanyak 8 orang, Eselon II sebanyak 1 orang.

Sebagai instansi yang mengurus sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi, DKP Provinsi dibantu oleh Kelembagaan yang sama di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu DKP Kabupaten/Kota. Dan untuk kewenangan yang berada di tingkat pusat, DKP Provinsi dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Komposisi jumlah pegawai/karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2017

OPD/Unit Kerja	Pendidikan yang ditamatkan				Jumlah
	SLTA	D1 s/d D3	D4/S1	S2	
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	13	6	53	14	86
Jumlah	13	6	53	14	86

Sumber: Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian DKP Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Tabel 2. Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Eselon

OPD/Unit Kerja	Eselon (orang)			Jumlah
	II	III	IV	
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	1	8	18	27
Jumlah	1	8	18	27

Sumber: Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian DKP Provinsi Sulawesi Barat, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sampai dengan tahun 2016 sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

a) Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris/Peralatan Kantor yang dimiliki terdiri atas meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya. Inventaris dan peralatan kantor tersebut diperoleh melalui pengadaan dari anggaran rutin dan pembangunan.

Tabel 3 Inventaris/Peralatan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis	Jumlah	Thn. Pengadaan
	AC Standing	1 Set	2013
	AC Split	5 Set	
	Kamera	2 Set	2013
	Handycame	2 Set	2013
	HP Satelit	1 Set	
	Alat Komunikasi	1 Paket	
	Tabung Selam	2 Set	2012
	BOD	2 Set	2012
	Regulator	2 Set	
	Konsul	2 Set	
	Baju Selam	2 Set	
	Masker	2 Set	
	Pin Oven	2 Set	
	Pemberat	2 Set	
	Tas Selam	2 Set	
	Alat Laboratorium	1 Paket	
	Pressure Cooker	1 Set	
	Rice Cooker	1 Set	
	Instalasi Telepon	1 Unit	
	Gelas Tutup	2 Set	
	Gelas Biasa	5 Set	
	Mangkok	2 Set	
	Sendok	5 Set	
	Piring	5 Set	
	Cangkir	5 Set	
	Toples	5 Set	
	Wajan	1 Set	
	Panci Besar	1 Set	
	Desk Note	1 Set	
	UPS	3 Set	
	Mouse	5 Set	

Flash Disk	11 Set
Kipas Angin	5 Set
Tape Recorder	1 Set
Rak Buku	1 Set
Alat GPS	1 Set
Papan Pengumuman	8 Set
Rak Koran	1 Set
Check Clock	1 Set
Layar Monitor	1 Set
Disc Eksternal/Internal	2 Set

Sumber: Renstra DKP Sulawesi Barat Tahun 2011-2016

b) Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 4. Kendaraan Dinas

No.	Jenis	Merk	Unit	Thn. Perolehan
1	Mobil	Innova-Toyota	1	2006 (APBD)
2	Mobil	Avanza-Toyota	1	
3	Motor	Shogun-Suzuki	1	2005 (APBD)
4	Motor	Supra X-Honda	3	2006 (APBD)
5	Motor	Shogun-Suzuki	2	2007 (APBD)
6	Motor	Supra-Honda	1	2007 (APBD)

Sumber: Renstra DKP Sulawesi Barat Tahun 2011-2016

Kendaraan dinas roda 4 (empat) dan sejumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) masih dalam keadaan layak jalan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri DalamNegeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan PrasaranaKerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah,cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja ditujukan bagi saranaprasarana kerja pejabat lingkup Pemerintah Daerah, sehingga rasioketersediaan sarana prasarana dengan jumlah personil secarakeseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas maupunkuantitas.

2.2.3. Potensi Sumber Daya Alam

Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat juga berpotensi besar untuk dikembangkan, mengingat Sulawesi Barat memiliki garis pantai yang panjang sekitar 617 Km pada sisi barat Pulau Sulawesi yang berhadapan dengan Selat Makassar. Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi perikanan laut (tangkap) dari berbagai jenis ikan pelagis dan ikan demersal serta ikan-ikan karang serta pengembangan mariculture (budidaya laut) yang sangat potensial tersebut. Selain potensi perikanan tangkap, Sulawesi Barat juga memiliki potensi

perikanan budidaya seperti udang, bandeng, kepiting, teripang dan berbagai jenis komoditas ikan yang berkembang biak dan hidup di wilayah perairan laut, perairan payau dan perairan tawar. Potensi perikanan pada tiga jenis perairan tersebut diatas di Provinsi Sulawesi Barat dapat dijadikan salah satu alternatif untuk dikembangkan melalui revitaliasi budidaya, menggalakkan industri perikanan (misal tepung ikan dan pengalengan ikan serta upaya , mengolah dan memasarkan ikan sesuai standar yang ditetapkan dan peningkatan sumberdaya manusia.

a. Perikanan Budidaya

Kegiatan perikanan budidaya di Sulawesi Barat pada dasarnya terdiri atas tiga kawasan yaitu budidaya air payau, budidaya laut dan budidaya air tawar. Data potensi budidaya air payau yang tersebar pada 6 kabupaten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Data Potensi Budidaya Air Payau Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Potensi (ha)	Produktif (ha)	Produktif (%)
1	Polewali Mandar	12.300	5.123	41,65
2	Mamasa	-	-	-
3	Majene	900	487	54,11
4	Mamuju	4.400	2.924	66,45
5	Mamuju Tengah	8.500	3.332	39,2
6	Mamuju Utara	3.900	1.903	48,79
	Jumlah	30.000	13.769	45,90

Keterangan :Data Statistik PB 2016

Berdasarkan Tabel di atas, potensi budidaya air payau di Sulawesi Barat hingga tahun 2016 ini sebesar 30.000 ha. Dari potensi luas lahan budidaya tersebut yang produktif baru sekitar 13.769 ha atau 45,90%. Hal ini berarti bahwa potensi pengembangan budidaya air payau di Sulawesi Barat masih cukup besar atau sekitar 54,10% dari potensi lahan budidaya yang tersedia. Dari data tersebut terlihat bahwa lahan produktif untuk budidaya air payau tertinggi terdapat di Kabupaten Polewali Mandar seluas 5.123 ha atau 41,65% dari potensi seluas 12.300 ha. Sementara itu potensi pengembangan budidaya air payau di Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat besar karena baru sekitar 39,20% lahan yang produktif dari 8.500 Ha yang potensial.

Data potensi budidaya laut di Sulawesi Barat hingga tahun 2016 ini sebesar 40.600 ha. Dari potensi luas lahan budidaya tersebut yang produktif baru sekitar 2.501,5ha atau 6,16%. Hal ini berarti bahwa potensi pengembangan budidaya laut di Sulawesi Barat masih sangat besar atau sekitar 93,84% dari potensi lahan budidaya yang tersedia. Dari data tersebut terlihat

bahwa lahan produktif untuk budidaya laut tertinggi terdapat di Kabupaten Polewali Mandar seluas 1.738,7 ha atau 31,04% dari potensi seluas 5.600Ha. Sementara itu potensi pengembangan budidaya air laut di Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat besar karena baru sekitar 2,41% lahan yang produktif dari 6.200 Ha yang potensial.

Tabel 6. Data Potensi Budidaya Laut Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Potensi (ha)	Produktif (ha)	Produktif (%)
1	Polewali Mandar	5.600	1.738,7	31,04
2	Mamasa	-	-	
3	Majene	7.200	-	
4	Mamuju	8.200	612,8	7,47
5	Mamuju Tengah	6.200	150	2,41
6	Mamuju Utara	13.400	-	
Jumlah		40.600	2.501,50	6,16

Keterangan : Data DKP 2016

Data potensi budidaya air tawar di Sulawesi Barat hingga tahun 2016 sebesar 24.000 Ha. Dari potensi luas lahan budidaya tersebut yang produktif hanya sekitar 8.478,4 Ha atau 35,33%. Hal ini berarti bahwa potensi pengembangan budidaya air tawar di Sulawesi Barat masih cukup besar atau sekitar 64,67% dari potensi lahan budidaya yang tersedia. Dari data tersebut terlihat bahwa lahan produktif untuk budidaya air tawar tertinggi terdapat di Kabupaten Mamasa seluas 7.715Ha atau 62,70% dari potensi seluas 12.300Ha. Sementara itu potensi pengembangan budidaya air tawar di Kabupaten Majene masih sangat besar karena baru sekitar 1,67% lahan yang produktif dari 2.400 Ha yang potensial.

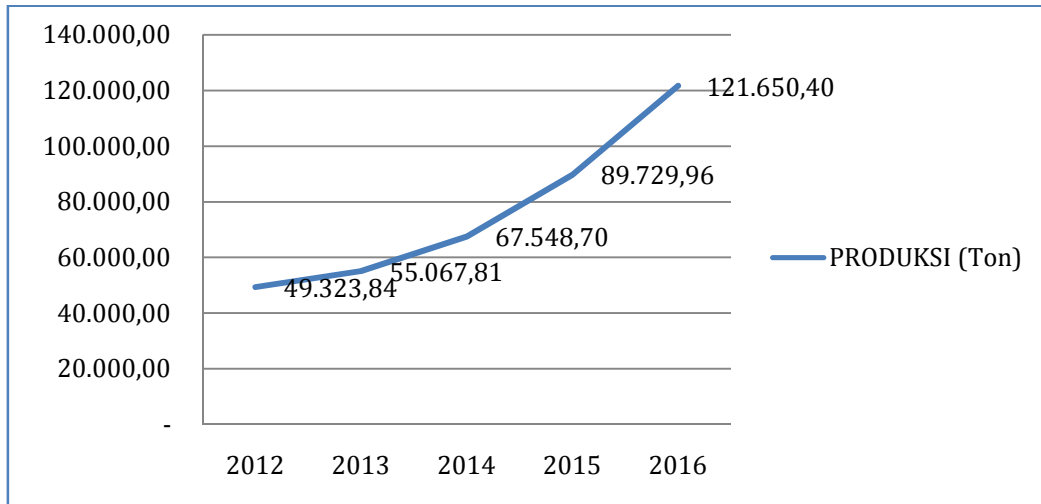
Tabel 7. Data Potensi Budidaya Air Tawar Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Potensi (ha)	Produktif (ha)	Tingkat Produktif (%)
1	Polewali Mandar	3.200	336	10,50
2	Mamasa	12.300	7.715	62,70
3	Majene	2.400	40	1,67
4	Mamuju	2.300	141,40	6,15
5	Mamuju Tengah	1.300	117	9,00
6	Mamuju Utara	2.500	129	5,16
Jumlah		24.000	8.478,4	35,33

Keterangan : Data DKP 2016

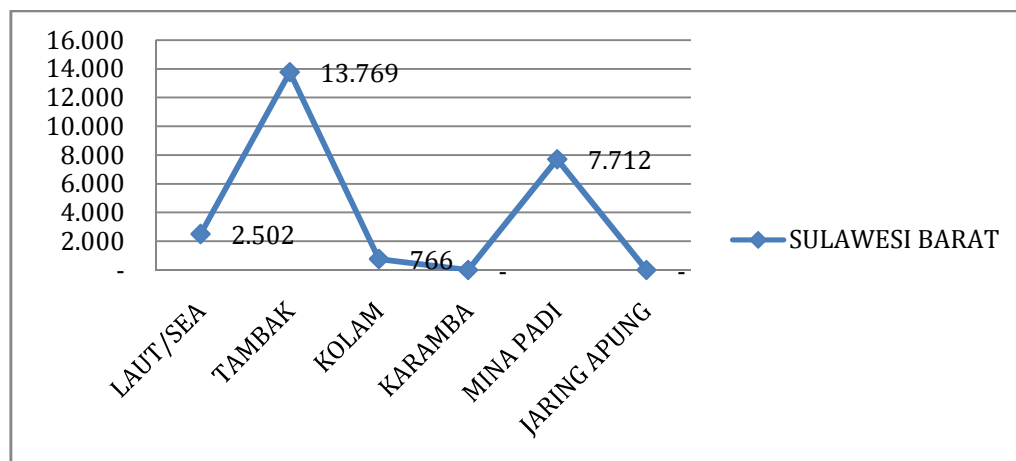
Budidaya perikanan di wilayah pesisir Sulawesi Barat umumnya memanfaatkan ikan padatambak/empang, kolam, keramba, sawah, dan jaring apung dan jaring tancap. Komoditi utama yang dibudidayakan di pesisir Sulawesi Barat adalah ikan bandeng, udang windu, udang

vaname, dan rumput laut serta jenis ikan air tawar seperti ikan mas, lele, nila dan mujair. Potensi produksi budidaya perikanan di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

Perkembangan produksi perikanan budidaya di Sulawesi Barat menunjukkan cenderung meningkat untuk kurun waktu tahun 2012-2016. Rata-rata peningkatan produksi sebesar 25,68 % untuk kurun waktu tahun 2012-2016. Luasan lahan untuk produksi budidaya perikanan di Sulawesi Barat pada tahun 2016, terlihat pada grafik berikut:



Gambar 4. Luasan (ha) Areal Perikanan Budidaya di Sulawesi Barat

b. Perikanan Tangkap

Kegiatan perikanan tangkap merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak digeluti oleh masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan luas wilayahnya, memiliki rata-rata kepadatan stok ikan sebesar 1 ton/tahun dengan potensi perikanan laut sebesar 1.026.599 ton/tahun (WPP 713) Potensi perikanan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan sumberdaya ikan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis Ikan	Potensi(ton)	Tingkat Pemanfaatan
1	Ikan Pelagis Kecil	104.546	0.61
2	Ikan Pelagis Besar	419.342	0.86
3	Ikan Demersal	77.238	1.04
4	Ikan Karang	365.420	0.34
5	Udang Penaeid	37.268	1.70
6	Lobster	1.020	1.40
7	Kepiting	5.016	1.59
8	Rajungan	6.740	1.52
9	Cumi - cumi	10.010	1.70
Total		1.026.599	

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Potensi perikanan laut dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menggali potensi perikanan yang ada. Salah satu kendala dalam menggarap potensi perikanan ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan yang masih belum memadai dari jumlah dan jenisnya. Potensi perikanan juga menyimpan potensi konflik yang sangat besar mengingat sumberdaya bersifat milik bersama (commonproperty).

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan/atau indikator lainnya seperti MDGs ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011–2016.

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016

Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan																		
Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola					4	5	6	5		2	3	2	3		50	60	33,33	60
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir																		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pengendalian sumber daya																		
Menurunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan																		
Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap (ton)					50.000,00	73.690,00	84.855,00	50.524,00		45.810,00	46.717,40	55.759,30	64.335,00		91,62	63,40	65,71	127,34
Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya (ton)					62.257,00	71.529,00	77.276,00	83.518,00		55.067,81	67.548,70	89.729,96	102.269,63		88,45	94,44	116,12	122,45
Meningkatnya jumlah konsumsi ikan (kg)					46	46,86	49,16	54		45,14	46,8	47,57	48,43		98,13	99,87	96,77	89,69

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Belanja	21.684.557.904,80	43.624.283.291,00	47.409.184.906,13	20.204.959.414,28	26.717.135.217,00	19.467.056.061,00	41.876.048.443,00	30.382.755.085,00	19.934.465.024,00	25.844.496.122,00	89,77	95,99	64,09	98,66	96,73

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang pengembangan pembangunan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan di Propinsi Sulawesi Barat.

2.4.1. Tantangan (*Threath*) Pengembangan

a. *Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan*

Upaya peningkatan produksi perikanan dan kelautan saat ini terkendala oleh penurunan daya dukung lingkungan perairan, baik untuk usaha budidaya maupun penangkapan, akibat eksploitasi dan pemanfaatan SDKP yang tidak sustainable serta pencemaran lingkungan perairan.

b. *Adanya ancaman hama penyakit, bencana alam, dan pelanggaran hukum kelautan perikanan*

Hama penyakit pada budidaya perikanan, bencana banjir, gempa dan abrasi pantai serta pelanggaran alat tangkap tidak ramah lingkungan, merupakan kondisi yang tidak mendukung peningkatan produksi perikanan.

c. *Masuknya produk impor*

Masuknya produk impor hasil perikanan dalam bentuk olahan ke daerah–daerah merupakan ancaman bagi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam bersaing dengan produk impor baik dalam hal harga, kemasan, maupun cita rasa produk.

d. *Masih terjadinya IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing*

Penyebab terjadinya *IUU Fishing* adalah rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini;terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut;lemahnya kemampuan SDM nelayan dan banyaknya pengusaha bermental *broker*;sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk perizinan masih dalam bentuk terbuka, dimana yang dibatasi hanya alat tangkap; serta masih lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum.

2.4.2. Peluang (*opportunity*) Pengembangan

a. *Terbukanya pangsa pasar*

Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu, adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu didukung dengan munculnya usaha – usaha kelautan dan perikanan yang baru dan inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar/masyarakat. Untuk itu, pengembangan sentra–sentra produksi yang berskala ekonomi serta keanekaragaman jenis komoditas perikanan merupakan hal yang penting dalam keunggulan sebuah produk.

b. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar

Dengan potensi wilayah pesisir di 5 kabupaten dan 1 Kabupaten berbasis daratan atau pegunungan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat membuka peluang bagi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan sumber penggerak ekonomi daerah.

c. Program pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang dilaksanakan di daerah.

Dengan adanya program kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat maka akan mendukung percepatan pembangunan perikanan daerah melalui industrialisasi berbasis blue economy yang secara teknologi maupun pendanaan tidak dimiliki oleh daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yang merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepantidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahunsebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Hasil identifikasi dan analisis perkembangan masalah Kelautan dan Perikanan dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi	Kemampuan nelayan untuk menambah sarana dan prasarana belum optimal
2	Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan	Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan	
3	Kondisi ekosistem yang umumnya rusak, misalnya ekosistem terumbu karang berada pada kisaran rusak sampai kritis di semua wilayah pesisir dan tingkat ketebalan ekosistem mangrove yang makin menipis (Data BPS Sulawesi Barat, 2015), yang mengakibatkan kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga sumber daya pangan, serta ancaman akan kehilangan mata pencaharian bagi nelayan.	Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi berbasis pendekatan spasial/kawasan	Rencana alokasi ruang belum terealisasi
4	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya produk unggulan daerah berbasis kelautan dan perikanan yang dikelola secara spasial/kawasan (<i>one village one product</i>) - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan - Masih terbatasnya informasi untuk berinovasi dalam mengolah produk - Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 	Sarpras dan pembinaan terhadap nelayan dalam mengolah produk hasil perikanan belum optimal
5	Masih maraknya kegiatan <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil - Masih belum optimalnya upaya pengawasan SDKP 	Sarpras dan aparat yang belum tersedia cukup di lapangan
7	Kawasan pengembangan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW belum dapat dibangun secara optimal	Masih terbatasnya sinergitas pembangunan antar sektor	Koordinasi dan sinergitas program yang masih rendah antar stakeholder
8	Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan	Minimnya kualitas sumberdaya manusia ASN perikanan maupun stakeholder perikanan dan kelautan	Kualitas SDM masih tergolong rendah

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat diinformasikan bahwa terdapat 4 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yang sering kali dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Renstra-PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merujuk pada Visi, Misi serta program prioritas Kepala Daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2017-2022 yang merupakan penjabaran yang lebih detail dari pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi, serta isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat dengan memperhitungkan modal dasar maka ditetapkan Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Misi 1: Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya;

Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya;

Misi 3: Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis;

Misi 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi;

Misi 5: Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Orientasi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Barat adalah pada kemajuan bidang Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan Lingkungan. Hal tersebut akan dicapai dengan meningkatkan kinerja pemerintah, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, mendorong upaya pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan revitalisasi Kelautan dan Perikanan, pemanfaatan Sumberdaya yang

berkelanjutan (pro lingkungan), menyusun perencanaan yang terukur dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara profesional dan akuntabel.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip money follow program prioritas yang fokus pada : (1). Pro pertumbuhan (pro growth), (2). Pro penanggulangan kemiskinan (pro poor); (3). Pro pembukaan lapangan kerja (pro job); (4). Pro pembangunan manusia (pro human development); (5). Pro pelestarian lingkungan (pro environment). Ini dilakukan dengan pendekatan anggaran berbasis akrual, kerangka penganggaran jangka menengah (KPJM) dan anggaran terpadu.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat ini merupakan sub-sistem dari perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penyusunannya tidak terlepas dari kondisi makro yang melingkupi dan mempengaruhi dinamika di sektor kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama status perencanaan (RPJMD dan RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di tujukan untuk memahami arah pembangunanyang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Misi ketiga dan keempat, disamping misi lainnya yang juga menjadi dampak dari keberhasilan pencapaian misi tersebut. Pencapaian misi tersebut dimanifestasikan dalam kebijakan program dan kegiatan tahunan dalam skenario pencapaian pembangunan jangka menengah.

Informasi mengenai faktor penghambat serta pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat diuraikan pada tabel 11 berikut:

Tabel 12. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pencapaian Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

VISI: SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2017-2022	Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1 MISI 3: MEMBANGUN DAN MENGUATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH BERBASIS UNGGULAN STRATEGIS				
	Program 1: Pengembangan Pelabuhan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan - Belum adanya penetapan kuota dalam mengeluarkan ijin kapal perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan 	Dukungan anggaran
	Program 2: Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi ekosistem yang umumnya rusak, misalnya ekosistem terumbu karang berada pada kisaran rusak sampai kritis di semua wilayah pesisir dan tingkat ketebalan ekosistem mangrove yang makin menipis (Data BPS Sulawesi Barat, 2015), yang mengakibatkan kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga sumber daya pangan, serta ancaman akan kehilangan mata pencaharian bagi nelayan - Adanya konflik pemanfaatan dan kewenangan antara wilayah pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi berbasis pendekatan spasial/kawasan - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan 	Pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan serta pertambangan, khususnya di wilayah laut dan pesisir akan menaati peraturan yang Berlaku
2 MISI 4: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING TINGGI				
	Program 1 : Pengembangan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap - Ketersediaan armada dan alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan yang modern masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap - Masih sulitnya nelayan mendapatkan informasi secara akurat tentang keberadaan fishing ground/daerah tangkapan ikan 	Luas perairan yang masih belum tergarap dan besarnya jumlah nelayan
	Program 2: Pengembangan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya produktifitas perikanan budidaya 		Luas kawasan budidaya yang belum terkelola
	Program 3: Pengembangan Pelabuhan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan - Penerbitan surat ukur kapal oleh perhubungan laut masih membutuhkan waktu yang lama sehingga 	Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan	

	menghambat percepatan penerbitan SIPI dan SIKPI		
Program 4: Pengembangan Balai Benih Ikan/Udang Pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Peran dan fungsi UPTD belum optimal - Ketersediaan sumber daya manusia perikanan dan kelautan - Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan - Kurangnya tenaga penyuluh di provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai dengan perkembangan teknologi budidaya - Penerapan teknologi budidaya ikan terbatas - Harga input produksi yang tinggi dan kualitas yang rendah - Balai benih ikan/udang di Poniang masih butuh dukungan operasionalisasi lebih baik agar tidak tergantung dari pasokan luar 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi UPTD, OPD dan kementerian Kelautan dan Perikanan - Optimalisasi sistem perbenihan - Dukungan anggaran yang memadai - Komitmen pimpinan dalam peningkatan kemandirian pangan
Program 5: Pengembangan Balai Benih Budidaya Air Tawar	<ul style="list-style-type: none"> - Peran dan fungsi UPTD belum optimal - Ketersediaan sumber daya manusia perikanan dan kelautan - Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan - Kurangnya tenaga penyuluh di provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai dengan perkembangan teknologi - Rendahnya Pengetahuan, Keterampilan dan sikap pembudidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi sistem perbenihan - Dukungan anggaran yang memadai - Komitmen pimpinan dalam peningkatan kemandirian pangan - Konsolidasi UPTD, OPD dan kementerian Kelautan dan Perikanan
Program 6: Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembangunan kawasan pengembangan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum sinkronnya pembangunan berbasis kawasan - Belum adanya penataan dan pemetaan komoditas perikanan dengan kesesuaian potensi wilayahnya 	
Program 7: Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing - Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan - Penyajian data pengolahan yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mutu hasil olahan yang masih dianggap rendah - Usaha perikanan dianggap tidak stabil, resiko terlalu tinggi untuk pengembalian pinjaman - Kurangnya keahlian dan sumber daya petugas pengolah data di kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berkeinginan untuk mengembangkan usahanya dengan tambahan modal baik dari pemerintah maupun sumber pembiayaan formal lainnya - Sosialisasi/pelatihan/pembinaan bidang pengolah yang terus ditingkatkan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusanyang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat melihat bahwa memang sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat telah mengusung indikator yang sama. Masing-masing level pemerintah menetapkan target indikator sarasannya dan akan diukur pencapaiannya tiap tahun. Berdasarkan hasil pencapaian inilah nanti akan ditentukan sasaran yang belum optimal dikerjakan dan usaha apa yang perlu ditempuh untuk memperbaiki keadaan tersebut pada periode renstra 5 tahunan berikutnya.

Terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional khususnya di sektor pembangunan kelautan dan perikanan, kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi: "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional". Hal ini menjadi dasar dalam menyusun kerangka pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Barat.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni "Kedaulatan", "Keberlanjutan", dan "Kesejahteraan" dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer prespective*, *internal process prespective*, dan *learning and growth prespective*.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra-PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya berdasarkan hasil review analisis terhadap Renstra K/L maka perlu diketahui faktor-faktor penghambat maupun pendorong. Permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang terkait dengan sasaran jangka menengah Resntra KKP disajikan dalam tabel 12 berikut:

Tabel 13. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan Perikanan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Faktor-faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>stakeholders perspective</i>				
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Pendapatan Nelayan/Pembudidaya/Pengolah ikan yang masih rendah	Lemahnya permodalan dibidang kelautan dan perikanan	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk peningkatan pendapatan Nelayan
<i>customer perspective</i>				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sdkp	Peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan belum dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan global		
3	Terwujudnya pengelolaan sdkp yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Belum adanya penataan dan pemetaan komoditas perikanan dengan kesesuaian potensi wilayahnya	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal nilai strategis sumber daya perikanan dan kelautan, yang berimplikasi pada lemahnya apresiasi masyarakat untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut.	Dukungan anggaran
<i>internal process perspective</i>				
4	Tersedianya kebijakan pembangunan kp yang efektif	Kebijakan pemanfaatan ruang yang belum optimal		
5	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sdkp yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan			
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sdkp yang profesional dan partisipatif	Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan		
<i>learning and growth perspective</i>				
7	Terwujudnya asn kkp yang kompeten, profesional dan berkepribadian	-	-	-

8	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	-	-	-
9	Terwujudnya birokrasi kkp yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	-	-	-
10	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	-	-	-

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Provinsi Sulawesi Barat memiliki 6 kabupaten dimana terdapat 5 kabupaten berada di wilayah pesisir, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara. Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak antara 0o 46'13,03"- 3o 46'13,4" Lintang Selatan dan 116o 47' 22,6"-119o 52'17,07" Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Makassar di sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 20.859,74 kilometer persegi yang meliputi 6 Kabupaten. Luas wilayah laut Provinsi Sulawesi Barat sekitar 22.012,75 Km² dengan panjang garis pantai 617,5 km dengan jumlah pulau-pulau kecil 41 buah, memiliki kawasan pesisir dan laut yang luas beserta kandungan kekayaan sumber daya hayati laut melimpah, seperti ikan, rumput laut, hutan mangrove, terumbu karang, dan biota lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Barat Tahun 2014–2034, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Sulawesi Barat adalah : "Mewujudkan Tatanan Ruang Wilayah Provinsi Yang Produktif Dan Berwawasan Lingkungan, Mendukung Pemenuhan Hak-Hak Dasar Dan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Secara Berkelanjutan Berbasis Pada Perkebunan, Pertambangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Perdagangan, Industri, Pariwisata Dan Pendidikan". Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Sulawesi Barat hendaknya mampu memberikan daya guna dan hasil guna sesuai arahan pemanfaatan ruang, untuk menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tetap mempertimbangkan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skop nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini kabupaten dan kota diberi peluang dan arahan untuk secara mandiri melakukan swatata pusat-pusat kegiatan skop kabupaten maupun yang lebih mikro. Secara fisik interkoneksi antar pusat-pusat tersebut didukung oleh rencana pengembangan sistem transportasi, sistem informasi dan

komunikasi, sistem energi, sistem tata air dan sistem sanitasi. Secara sistemik prasarana dan sarana lintas kabupaten tersebut direncanakan mempunyai daya dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar pusat-pusat kegiatan tersebut (*RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034*).

Pola ruang wilayah provinsi ini direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun budidaya yang bersifat lintas kabupaten kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten diserahkan wewenang termasuk tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing (*RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034*).

Dari hasil penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dikemukakan faktor penghambat dan pendorong pada tabel 11 berikut:

Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Faktor-faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Rencana Kawasan Budidaya Provinsi - Kawasan Perikanan	- Struktur dan kualitas sarana dan prasarana belum memadai	- Kualitas SDM	- Secara Geografis posisi Provinsi Sulawesi Barat terletak di bagian barat Pulau Sulawesi membentang sepanjang selat Makassar. Sangat potensial bagi pengembangan kerja sama regional untuk memicu pengembangan ekonomi lokal agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian regional Sulawesi dan nasional.
a.	kawasan tambak udang dan ikan bandeng di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene;	- Jaringan irigasi terbatas - Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai	- Pola Budidaya masih tradisional - Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan	- Secara Geomorfologi, karakteristik wilayah dataran rendah dan tinggi member peluang pengembangan produk komoditi unggulan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dan daya dukung wilayah
b.	kawasan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;	- Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan	- Belum adanya penetapan kuota dalam mengeluarkan ijin kapal perikanan	- Dukungan Pembiayaan
c.	kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara;			
d.	kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Banggae (Majene), Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali Mandar), dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya.			

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan khususnya di bidang perikanan budidaya harus memperhatikan fungsi lahan tersebut, agar aktivitas perikanan tidak mengurangi daya dukung lingkungannya.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektoral dan stakeholders lainnya. Konflik kepentingan ini tidak hanya terjadi antar sektoral dalam pemerintahan tetapi juga dengan masyarakat setempat dan pihak swasta. Kedua, lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumber daya pesisir dan lautan, serta perangkat hukum untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya ini yang tidak terkendali. Juga tidak adanya kekuatan hukum dan pengakuan terhadap sistem-sistem tradisional serta wilayah ulayat laut dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Ketiga, masih minimnya keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Tidak mengherankan apabila masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap pesisir dan lautan yang lestari serta pemahaman tentang pentingnya nilai ekonomis dan non-ekonomis dari keberadaan pesisir dan lautan yang perlu dijaga (*KLHS RZWP3K-Provinsi Sulawesi Barat 2017*).

Ditinjau dari implikasi KLHS, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak bertentangan dengan rekomendasi KLHS atau tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penjaringan isu-isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam penentuan isu-isu strategis, maka perlu direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari:

3.5.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Tenaga dibidang Kelautan dan Perikanan merupakan pendukung utama dalam percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Jumlah dan kualitas tenaga kelautan dan perikanan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebanyak 86 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 14 orang; pendidikan S1 sebanyak 53 orang, pendidikan D1/D3 sebanyak 6 orang, sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 13 orang. Dilihat dari Eselon, dari 86 orang terdiri dari Eselon IV sebanyak 18 orang, Eselon III sebanyak 8 orang, Eselon II sebanyak 1 orang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat didukung 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang Teknis dan 2 (Dua) UPT terdiri :

1. Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Laut
2. Bidang Perikanan Budidaya

3. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Pantai Poniang.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan “Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer prespective*, *internal process prespective*, dan *learning and growth prespective*.

1. *stakeholders prespective*, Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”
2. *customer prespective*, Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”
3. *internal process prespective*,
4. *learning and growth prespective*, Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
 - a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
 - b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
 - c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.

d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni "Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel", dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.5.3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skup nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini kabupaten dan kota diberi peluang dan arahan untuk secara mandiri melakukan swatata pusat-pusat kegiatan skup kabupaten maupun yang lebih mikro. Secara fisik interkoneksi antar pusat-pusat tersebut didukung oleh rencana pengembangan sistem transportasi, sistem informasi dan komunikasi, sistem energi, sistem tata air dan sistem sanitasi. Secara sistemik prasarana dan sarana lintas kabupaten tersebut direncanakan mempunyai daya dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar pusat-pusat kegiatan tersebut.

Pola ruang wilayah provinsi ini direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun budidaya yang bersifat lintas kabupaten kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten diserahkan wewenang termasuk tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing.

3.5.4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

KLHS merupakan suatu yang sangat diperlukan dalam mendukung pembangunanberkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa pertimbangan yang mendasaripentingnya KLHS dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan antara lain: 1) krisis danbencana lingkungan hidup yang tiada henti, dan 2) untuk memastikan bahwa prinsippembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Penerapan KLHS dalam pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat bermanfaat dalam:

- Meningkatkan manfaat pembangunan;
- Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya;

- Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan; dan
- Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Di Sulawesi Barat ada tiga isu pokok lingkungan strategis, yaitu (1) kerusakan lingkungan (berupa deforestasi, kerusakan kawasan tangkapan air DAS dan kawasan lindung, erosi, longsor, banjir, serta rusaknya wilayah perlindungan satwa dan plasma nutfa); (2) perencanaan, pelaksanaan & pengendalian pembangunan yang parsial (tidak terintegrasi satu dan lainnya) & tidak disinergikan dengan isu penyelamatan lingkungan dan lebih banyak bersifat jangka pendek; dan (3) gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan hasil telaahan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, maka untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dilakukan analisis penilaian isu strategis dengan menggunakan metode yang dikenal dengan istilah pembobotan. Berbagai permasalahan dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kriteria pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15

6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
Total		100

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Hasil analisis perkembangan dan masalah Kelautan dan Perikanan dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka diperoleh permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat adalah selengkapanya dirinci sebagai berikut:

Tabel 16. Penilaian Isu Strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	20	10	20	10		25	85
2	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing		10					10
3	Keterbatasan infrastruktur/sarpras utama, pendukung dan fasilitas perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan	20	10	20	10			60
4	Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir dan pemanfaatan potensi nilai estetika wilayah pesisir dan ekosistem		10					10
5	Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha		10					10
6	Masih marak terjadinya <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi Sulawesi Barat	20	10					30
7	Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan	20	10	20			25	75
8	Persaingan Konsumsi protein hewan lain	20	10		10			40
9	Penataan ruang laut yang belum baik, degradasi ekosistem dan sumberdaya perikanan (Isu Lingkungan)						25	25
10	Inovasi teknologi pada usaha perikanan		10					10
11	Masih tingginya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan nelayan	20						20
12	Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan	20	10	20		15		65
13	Penerbitan surat ukur kapal oleh perhubungan laut masih membutuhkan waktu yang lama sehingga menghambat percepatan penerbitan SIPI dan SIKPI		10			15	25	50
14	Masih sulitnya nelayan mendapatkan informasi secara akurat tentang keberadaan fishing ground/daerah tangkapan ikan				10	15		25
15	Penanganan pascapanen yang masih konvensional dan belum stabilnya harga	20	10	20				50

16	Balai benih ikan/udang di Poniang masih butuh dukungan operasionalisasi lebih baik agar tidak tergantung dari pasokan luar	10		15	25	
17	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan	10	20		30	
18	Kapasitas SDM dan kelembagaan masih rendah	10			10	
19	Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) Provinsi Sulawesi Barat belum dapat terimplementasikan sesuai yang diharapkan	20	10	20	15	65
20	Rendahnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas	10				10
21	Belum adanya industri pengolahan perikanan guna mendongkrak nilai jual dan penghasilan masyarakat nelayan	20	10	20		50
22	Masih lemah dan terbatasnya pengawasan terhadap <i>IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) fishing</i>	10	20	15		45
23	Ketersediaan sarana prasarana pengawasan SDKP masih sangat terbatas	10		15		25
24	Rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan SDKP secara berkelanjutan		10	10		20
25	Minimnya tenaga tenaga professional dalam pengawasan SDKP		10			10
26	Terbatasnya pencegahan pengolahan dan pendistribusian produk perikanan yang dikelola secara <i>unsustainable way</i> (penggunaan formalin dan zat kimia berbahaya lain)		10	20		30

*Penentuan Skor berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	85	3,3
2	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing	10	0,4
3	Keterbatasan infrastruktur/sarpras utama, pendukung dan fasilitas perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan	60	2,3
4	Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir dan pemanfaatan potensi nilai estetika wilayah pesisir dan ekosistem	10	0,4
5	Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha	10	0,4
6	Masih marak terjadinya <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi Sulawesi Barat	30	1,2
7	Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan	75	2,9
8	Persaingan Konsumsi protein hewan lain	40	1,5

9	Penataan ruang laut yang belum baik, degradasi ekosistem dan sumberdaya perikanan (Isu Lingkungan)	25	1,0
10	Inovasi teknologi pada usaha perikanan	10	0,4
11	Masih tingginya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan nelayan	20	0,8
12	Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan	65	2,5
13	Penerbitan surat ukur kapal oleh perhubungan laut masih membutuhkan waktu yang lama sehingga menghambat percepatan penerbitan SIPI dan SIKPI	50	1,9
14	Masih sulitnya nelayan mendapatkan informasi secara akurat tentang keberadaan fishing ground/daerah tangkapan ikan	25	1,0
15	Penanganan pascapanen yang masih konvensional dan belum stabilnya harga	50	1,9
16	Balai benih ikan/udang di Poniang masih butuh dukungan operasionalisasi lebih baik agar tidak tergantung dari pasokan luar	25	1,0
17	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan	30	1,2
18	Kapasitas SDM dan kelembagaan masih rendah	10	0,4
19	Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) Provinsi Sulawesi Barat belum dapat terimplementasikan sesuai yang diharapkan	65	2,5
20	Rendahnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas	10	0,4
21	Belum adanya industri pengolahan perikanan guna mendongkrak nilai jual dan penghasilan masyarakat nelayan	50	1,9
22	Masih lemah dan terbatasnya pengawasan terhadap <i>IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) fishing</i>	45	1,7
23	Ketersediaan sarana prasarana pengawasan SDKP masih sangat terbatas	25	1,0
24	Rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan SDKP secara berkelanjutan	20	0,8
25	Minimnya tenaga tenaga profesional dalam pengawasan SDKP	10	0,4
26	Terbatasnya pencegahan pengolahan dan pendistribusian produk perikanan yang dikelola secara unsustainable way (penggunaan formalin dan zat kimia berbahaya lain)	30	1,2

*Penentuan Skor berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

Berdasarkan penentuan isu-isu strategis melalui pembobotan yang telah dilakukan seperti pada tabel di atas, maka diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautandan Perikanan. Pernyataantujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkansasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 18 berikut:

Tabel 18. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Peningkatan pendapatan nelayan 1,5% per tahun (Rp.juta/kapita/thn)	1.425.000	1.446.375	1.468.071	1.490.092	1.512.443
			Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan 1,5% per tahun (Rp.juta/kapita/thn)	1.750.000	1.776.250	1.802.894	1.829.937	1.857.386
			Peningkatan pendapatan hasil olahan produk KP sebesar 1% per tahun (Rp.juta/kapita/thn)	1.366.807	1.380.475	1.518.522	1.670.374	1.837.411
		Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap 2,5% per tahun (ton)	67.552	70.929	75.984	81.207	88.516
			Peningkatan produksi perikanan budidaya 2,5% per tahun (ton)	127.733	143.507	153.553	167.373	175.742
			Peningkatan produk olahan hasil kelautan dan perikanan sebesar 1% per tahun (ton)	4.029	4.069	4.110	4.151	4.193
		Meningkatnya hasil pemasaran produk kelautan dan perikanan	Peningkatan konsumsi ikan 0,5% per tahun (kg/kapita/thn)	48,67	48,91	49,15	49,39	49,64
			Peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berdaya saing	1	2	5	10	15
			Peningkatan jumlah UMKM dan UPI yang tersertifikasi	1	1	2	5	10
2.	Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan	Peningkatan luas kawasan konservasi perairan sebesar 10% selama 5 tahun (ha)	297.307	327.038	359.741	395.716	435.287
			Peningkatan pendapatan daerah dari sektor wisata bahari sebesar 1% per tahun (% dr tahun sebelumnya)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Terselenggaranya tata kelola pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan						
		Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang profesional terhadap produk kelautan dan perikanan	Peningkatan armada penangkap ikan yang moderndi perairan umum sebesar 0,1% per tahun (% thn sebelumnya)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Peningkatan teknologi budidaya tambak tingkat madya	1	1	1	1	1

			dan maju sebesar 1% per tahun (% thn sebelumnya)					
			Peningkatan penyerapan tenaga kerja bidang kelautan dan perikanan sebesar 1,5% per tahun (% thn sebelumnya)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3.	Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	Penambahan jumlah kapal patroli unit per tahun		1	1		1
			Peningkatan jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam pengawasan sumberdaya KP sebesar 5kelompok per tahun	40	60	100	140	200
			Penurunan angka pelaku <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> sebesar 80% selama 5 tahun	20	40	60	70	80
			Berkurangnya pelaku perusakan lingkungan sebesar 70% selama 5 tahun	50	55	65	70	80
		Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang bersifat implementatif	Penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)	16.6	30	60	80	100
			Rasio jumlah armada perikanan yang beroperasi sesuai aturan terhadap total armada perikanan (%)	70	75	80	85	90
4.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN Untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif	Jumlah SOP yang telah dibuat dan diimplementasikan pada layanan	5	10	12	15	20
			Terlaksananya pemeliharaan rutin dan sarana pendukung perkantoran (%)	100	100	100	100	100
			Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang memenuhi standar (%)	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Terpercaya	Meningkatnya jumlah apatur yang bekerja sesuai kompetensinya (%)	92	94	96	98	100
			Meningkatnya kehadiran aparatur minimal 80% setiap bulan	80	83	86	90	95

Sumber: Indikator Kinerja Utama, DKP Prov. Sulawesi Barat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Barat dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi. Strategi dapat dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai 6 Kabupaten yang wilayahnya dominan berada di wilayah pesisir (lima kabupaten berbasis pesisir dan hanya satu yang berada dipegunungan). Secara antropologis, pola pikir, ekonomi dan perilaku sosial dan budaya masyarakat pesisir di provinsi ini tidak dapat di pisahkan dari lingkungan pesisir dan laut. Ragam budaya dan kegiatan perekonomian banyak di pengaruhi oleh lingkungan pesisir baik berupa adat istiadat ataupun aktivitas mata pencaharian. Kondisi ini berlangsung terus menerus dari berbagai generasi hingga saat ini. Fakta di atas telah menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor andalan selain pariwisata dan perkebunan.

Sektor kelautan dan perikanan dapat di katakan sebagai salah satu pendorong utama dalam pencapaian visi misi. Arah kebijakan pembangunan di bidang perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan atas dasar pertimbangan potensi sumberdaya alam yang besar baik itu perikanan dan kelautan, pertanian atau perkebunan. Arah ini di kolaborasikan dengan prinsip-prinsip kerja ekonomi kerakyatan yang pada akhirnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menguatkan basis-basis pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dirumuskan secara komprehensif untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh OPD. Arah dan kebijakan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Barat, merupakan kebijakan yang berkaitan dengan visi, misi, prioritas dan strategi pembangunan daerah dan dijabarkan dalam visi misi dinas kelautan dan perikanan kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut maka arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat ditujukan pada tidak hanya revitalisasi usaha kelautan dan perikanan juga pengembangan kampung Nelayan yang berbasis spasial dan terintegrasi yang meliputi kebijakan :

1. Peningkatan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berbasis tematik holistik, integratif dan spasial melalui implementasi Pembangunan Desa Nelayan yang terintegrasi.
2. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifitas masyarakat kelautan dan perikanan
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan usaha bidang perikanan dengan memperhatikan komoditas unggulan dan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan
4. Peningkatan dan pengelolaan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mumpuni
5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan
6. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha produktif sektor kelautan dan perikanan
7. Penyediaan sarpras sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan
8. Memacu ketersediaan engine prosperity (mesin kesejahteraan) di sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kehadiran teknologi serta menciptakan inovasi baru
9. Penyediaan dan pelayanan informasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang berbasis IT.

Tabel 19. Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

VISI :SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI

MISI I : Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN Untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Terpercaya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kinerja Aparatur Sipil Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kinerja Aparatur Sipil Negara
MISI II : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya			
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN Untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Meningkatkan Dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi Menuju Good Governance 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Meningkatkan Dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi Menuju Good Governance
MISI III : Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis			
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya tata kelola Pelabuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang profesional terhadap produk kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penatakelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang bermutu dan terjangkau
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan Meningkatnya hasil pemasaran produk kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Peningkatan efisiensi usaha kelautan dan perikanan Perbaikan mutu dan daya saing produk kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan usaha bidang perikanan dengan memperhatikan komoditas unggulan dan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan Penataan kelembagaan dan tata kelola usaha dan kelompok masyarakat Diversifikasi produk kelautan dan perikanan Pemanfaatan potensi unggulan lokal Inovasi produksi kelautan dan perikanan potensi ekspor Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifitas masyarakat kelautan dan perikanan

MISI V : Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

- Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan
- Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan
- Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif
- Peningkatan luas kawasan konservasi perairan
- Peningkatan sistem pengawasan yang terpadu dan partisipatif yang dimaknai dengan adanya koordinasi antara aparatur terkait dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta menggunakan Sistem MCS (Monitoring, Controlling Surveillance) yang mumpuni
- Peningkatan luas kawasan konservasi perairan
- Peningkatan dan pengelolaan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mumpuni

BAB VI
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran strategi dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022, yang dimanifestasikan dalam rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Untuk melaksanakan kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat selama periode 2017-2022, maka ditetapkan tema dalam melaksanakan program kegiatan berdasarkan perwujudan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam tema yaitu :
 Tahun 2018, dengan Tema:

"Pengembangan Kampung Nelayan Berbasis Perikanan Tangkap"

Tahun 2019, dengan Tema:

"Pengembangan Kampung Nelayan Berbasis Perikanan Budidaya"

Tahun 2020, dengan Tema:

"Pengembangan Kampung Nelayan Sandeq untuk Peningkatan Kesejahteraan"

Tahun 2021, dengan Tema:

"Pengembangan Kampung Nelayan melalui Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan"

Tahun 2022, dengan Tema:

"Penguatan Kampung Nelayan Melalui Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"

Tema tersebut diatas merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA dengan efektif dan efisien. Penetapan tema dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan 14 program untuk kurun waktu 2017-2022, dengan penjelasan 5 program bersifat rutin dan 9 program bersifat mendukung langsung pencapaian sasaran di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022. Secara lebih detil rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan dalam lampiran 1.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Dalam perumusan indikator harus memenuhi asumsi keterukuran (*RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022*).

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat wajib mementingkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas yang memiliki nilai tambah, sehingga produk perikanan yang dihasilkan memberi manfaat lebih yang berujung kepada meningkatnya pendapatan. Indikator kinerja yang berhubungan dengan aspek pelayanan umum melalui peningkatan kesempatan usaha dan penyediaan lapangan kerja sektor perikanan dan kelautan. Sedangkan indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek daya saing adalah dengan upaya peningkatan jumlah sentra pengolahan hasil perikanan dan jumlah aneka produk hasil perikanan yang inovatif dan layak dikonsumsi, sehingga dapat diterima luas dan aman dikonsumsi masyarakat; hal tersebut mampu membuka peluang ekspor yang lebih besar dan menguntungkan ketimbang mengekspor produk perikanan bahan mentah.

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dituangkan pada tabel Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Layanan Urusan Pilihan								
8	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan (Ton)	195.284,67	168.442,11	180.223,06	192.849,38	210.205,82	229.124,34	1.389.304,26
2	Konsumsi Ikan (Kg)	48,91	49,40	49,90	50,40	51,40	52,43	50,41
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	50	55	60	65	70	75	62,5
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	1.006,80	1.067,21	1.120,43	1.131,24	1.307,27	1.411,85	7.134,80

BAB V

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Renstra-PD Dinas Kelautan dan Perikanan ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode 2017-2022, mengikuti periode berlakunya RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dokumen RPJP dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan rencana tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat selama periode lima tahun, 2017-2022 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula Renstra DKP mendukung totalitas akan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat demi terwujudnya visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2017-2022 yakni Sulbar Maju dan Malaqbiq.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan DKP Prov. Sulbar	Sasaran DKP Prov. Sulbar	Program/Kegiatan Prioritas DKP Prov. Sulbar	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022) Target	Unit Kerja Perangkat Daerah
					2018	2019	2020	2021	2022		
					Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN Untuk Penerapan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	10%	100%	100%	DKP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah tenaga administrasi jasa surat menyurat yang terbayarkan)	12 Bulan	12 orang	13 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Rekening (Listrik, telepon, air dan jaringan komputer) yang terbayarkan	12 Bulan	48 rekening	48 rekening	48 rekening	48 rekening	48 rekening	240 rekening	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang terbeli dan terpelihara (diservice)	1 paket	25 unit	35 unit	41 unit	42 unit	48 unit	48 unit	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang terbayarkan	12 Bulan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 Bulan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	2 Paket	50 dokumen	50 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan yang tersedia	12 Bulan	7 jenis	8 jenis	10 jenis	12 jenis	12 jenis	51 jenis	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening surat kabar / media cetak yang terbayarkan	1 Paket	36 rekening	36 rekening	36 rekening	48 rekening	48 rekening	48 rekening	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	12 Bulan	24 kali	24 kali	36 kali	36 kali	40 kali	40 kali	

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	Jumlah laporan Perjalanan Dinas luar daerah yang tersusun	12 Bulan	40 laporan	42 laporan	45 laporan	48 laporan	50 laporan	50 laporan	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	Jumlah laporan Perjalanan Dinas dalam daerah yang tersusun	6 Kabupaten	85 laporan	87 laporan	90 laporan	95 laporan	98 laporan	98 laporan	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia	-	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	70 %	70%	80 %	85 %	90 %	90 %	DKP
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Paket	5 unit	5 unit	6 unit	6 unit	7 unit	1 Paket	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan rehabilitasi gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli		0	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terbeli	24 unit		2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	9 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	24 unit	25 unit	27 unit	30 unit	32 unit	34 unit	34 unit	
	Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun/ tersedia	0	0	0	1 unit	0	0	1 unit	
	Pengadaan Meubeler Kantor	Jumlah meubeler yang terbeli	1 Paket	0	3 jenis	0	3 jenis	3 jenis	9 jenis	
Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Terpercaya	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	DKP
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian pegawai yang terbeli	87 Orang	0	155 org	179 org	203 org	203 org	203 org	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	DKP

Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	25 orang
Sosialisasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Bid. Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta yang memahami hukum dan peraturan perundang-undangan bid. Kelautan dan Perikanan	-	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
Bimtek Peningkatan Sumberdaya Manusia ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	-	-	155 Orang	179 orang	203 orang	203 orang	203 orang
Penguatan Kinerja ASN melalui kegiatan <i>Outbond</i>	Jumlah pegawai DKP Sulbar yang mengikuti outbond	-	-	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Untuk Perwujudan Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	DKP
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DKP yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DKP Prov. Sulbar yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan
	Penyusunan LKPJ, LAKIP dan LPPD SKPD	Jumlah laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15 Laporan
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD.	Jumlah dokumen RKA-DPA yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
	Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD.	Jumlah dokumen RKA-P/DPPA yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
	Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Sistem Informasi, Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah jasa operator keuangan, komputer dan jaringan yang terbayarkan	60 Bulan	17 orang	17 orang	18 orang	18 orang	18 orang	19 orang	19 orang
	Rapat Koordinasi Forum SKPD DKP Se-Prov. Sulbar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Forum SKPD - DKP Se-Prov. Sulbar	1 Kegiatan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
	Penyusunan RENJA Pokok dan RENJA Perubahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen

		Penyusunan RENJA 2019 dan RENJA Perubahan TA. 2018	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	
		Forum Musyawarah Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang mengikuti forum musyawarah Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat	-	0	0	40 orang	0	0	40 orang	
		Kegiatan Forum Petugas Statistik DKP Prov. Sulbar	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Data Statistik DKP se Provinsi Sulawesi Barat	-	0	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
		Validasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan Prov Sul-Bar	Jumlah data statistik bidang kelautan dan perikanan yang akurat dan valid	-	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4Laporan	
		Pengembangan data/ informasi kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen data/ informasi bidang kelautan dan perikanan yang tersusun		0	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	DKP
		Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Jumlah hari operasi kapal pengawas perikanan	150 hari	150 hari	150 hari	150 hari	150 hari	150 hari	150 hari	
		Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Jumlah data dan informasi terhadap usaha perbenihan, pembudidayaan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan, serta usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang memenuhi aturan	-	-	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tersedia	4 unit	2 unit	2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	9 unit	
		Pembinaan POKMASWAS	Jumlah Pokmaswas yang terbina dan memiliki administrasi yang baik	40 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	
		Verifikasi, monitoring dan evaluasi POKMASWAS									

Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta yang meningkat kesadarannya terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	30 orang	-	30 orang	-	85 orang	
Sosialisasi dan deseminasi aturan perundang-undangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya terhadap aturan perUU Pengawasan SDKP	-	-	-	30 orang	-	-	30 orang	
Konservasi, pemantauan dan karantina sumber daya kelautan dan perikanan									
Pembinaan konservasi dan pengendalian lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah kegiatan Pembinaan Konservasi dan Pengendalian Lingkungan SDKP	-	-	-	-	3 kali	3 kali	6 kali	DKP
Bimbingan Teknis Operasi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Jumlah Bimtek Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan;	-	-	-	30 orang	-	-	30 orang	DKP
Peningkatan SDM Aparat pengawas dan POKMASWAS	Jumlah aparat pengawas kelautan dan perikanan yang terlatih scuba diving	-	20 orang	-	-	30 orang	-	50 orang	
Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Prov. Sulbar	Jumlah anggota tim terpadu pengawasan SDKP yang terbentuk	-	-	-	20 orang	-	-	20 orang	
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan dan penegakan hukum SDKP	6 laporan	-	-	-	2 laporan	2 laporan	4 laporan	

	Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bidang Kelutan dan Perikanan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan forum koordinasi	-	-	-	30 orang	-	30 orang	60 orang	DKP	
	Temu Teknis Pengawas Perikanan Tingkat Sulawesi Barat	Jumlah peserta temu teknis pengawas perikanan tingkat Provinsi Sulbar	-	-	30 orang	-	30 orang	30 orang	90 orang	DKP	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase perkembangan perikanan Budidaya dalam menunjang peningkatan produksi, kesejahteraan pembudidaya dan terwujudnya industri aquaculture yang berdaya saing dan berkelanjutan	4%	5%	6%	7%	8%	8%	8%	DKP
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	9 unit	10 unit	15 unit	33 unit	30 unit	30 unit	30 unit		
	Temu Lapang Budidaya Perikanan	Jumlah laporan temu lapang, temu teknis dan temu usaha budidaya air laut, air payau yang tersusun	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		
	Pengembangan Budidaya Air Payau, Air Laut dan Air Tawar	Jumlah sarana budidaya air payau, air laut dan air tawar yang tersedia;	18 unit	-	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit		
	Sertifikasi bidang tanah Pembudidaya	Jumlah sertifikat tanah pembudidaya yang difasilitasi		100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	200 Sertifikat		
	Sertifikasi CBIB dan pengawasan CBIB	Jumlah sertifikat CBIB yang terbit dan pengawasan CBIB	400 sertifikat	100 sertifikat	100 sertifikat	100 sertifikat	100 sertifikat	100 sertifikat	400 sertifikat		
	Pengelolaan perizinan pembudidayaan ikan	Jumlah kawasan budidaya yang usahanya terfasilitasi	-	6 kawasan	-	6 kawasan	6 kawasan	6 kawasan	6 kawasan		
	Pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah kawasan budidaya bebas residu	-	6 kawasan	-	6 kawasan	6 kawasan	6 kawasan	6 kawasan		
	Pemantauan dan analisis kesehatan ikan dan lingkungan										

Pembinaan, pendampingan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan									
Pengembangan SDM aparatur dan pembudidaya	Jumlah aparatur dan pembudidaya yang terlatih	-	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	
Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok perikanan budidaya	Jumlah laporan hasil verifikasi dan monitoring kelompok perikanan budidaya	-	-	-	30 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase perkembangan perikanan tangkap dalam menunjang peningkatan produksi, kesejahteraan nelayan dan terwujudnya industri perikanan tangkap yang berdaya saing dan berkelanjutan	7%	7%	8%	8%	9%	10%	10%	DKP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia	17 unit	45 unit	27 Unit	27 Unit	15 Unit	27 Unit	141 unit	
Replacemant sarana perikanan tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang tergantikan/ diperbaharui	-	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	25 unit	
Inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan	Jumlah peserta kegiatan pengenalan inovasi teknologi penangkapan ikan	-	30 orang	30 orang			30 orang	30 orang	
Pengenalan dan penguasaan karakteristik daerah penangkapan ikan	Jumlah peseta kegiatan pengenalan dan penguasaan karakteristik daerah penangkapan ikan	-	25 orang	-	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	
Rakor Forum Kenelayanan se Prov. Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang mengikuti rapat forum kenelayanan	-	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	
Festival Nelayan se Sulawesi Barat	Jumlah nelayan yang mengikuti festival nelayan	-	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Jumlah dokumen katalog kapal perikanan dan alat tangkap yang tersusun	-	-	1 dokumen				1 dokumen	
Cek Fisik Penerbitan SIPI, SIKPI dan Penerbitan Buku Kapal	Jumlah kapal perikanan yang terfasilitasi cek fisik untuk penerbitan SIPI, SIKPI dan buku kapal;	74 kapal	120 kapal	150 kapal	170 kapal	180 kapal	200 kapal	920kapal	

Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal dan Alat Penangkapan Ikan	Jumlah peserta yang terlatih dalam melakukan cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan	20 orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	50 orang
Pelatihan keahlian BST, ANKAPIN, dan ATKAPIN bagi nelayan	Jumlah nelayan yang terfasilitasi sertifikat keahlian BST, ANKAPIN dan ATKAPIN	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	150 orang
Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan bagi masyarakat nelayan	Jumlah nelayan yang terlatih dan terampil dalam menggunakan alat bantu penangkapan ikan	-	100 orang	-	-	100 orang	100 orang	300 orang
Pelatihan Pembukuan Kegiatan Nelayan	Jumlah nelayan yang terlatih dalam pembukuan kegiatan nelayan	-	-	-	-	20 orang	20 orang	40 orang
Asuransi Nelayan Mandiri	Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan Asuransi secara mandiri	-						
Identifikasi dan sertifikasi bidang tanah nelayan	Jumlah data /laporan persiapan sertifikat tanah nelayan	-	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan
Pendampingan dan pembinaan Koperasi dan KUB	Jumlah koperasi dan KUB yang terbina	-	10 koperasi dan 100 KUB	10 Koperasi dan 100 KUB	10 Koperasi dan 100 KUB	10 Koperasi dan 100 KUB	10 Koperasi dan 100 KUB	10 Koperasi dan 100 KUB
Sulbar Command Center untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah sarana prasarana penunjang Sulbar Comment Center yang tersedia	-	30 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	230 unit
Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok perikanan tangkap	Jumlah laporan/ data dan informasi terkait kelompok perikanan tangkap yang layak diberi bantuan	-				16 laporan	20 laporan	36 laporan
Identifikasi dan Pengembangan Kampung Nelayan Terintegrasi	Jumlah sarana dan prasarana untuk pengembangan kampung nelayan yang terbangun/direhabilitasi	-	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	250 unit
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Nelayan	Jumlah perempuan nelayan yang terlatih	-	-	-	-	25 orang	25 orang	50 orang

		Pelatihan Keterampilan Keluarga bagi Kelompok Perempuan Nelayan	Jumlah kelompok perempuan nelayan yang terlatih dan terampil	-	-	-	25 orang	-	25 orang	50 orang			
		Pemberdayaan Pengusaha/ Eksportir Lokal Ikan di Desa Nelayan	Jumlah pengusaha/ eksportir lokal yang meningkat pengetahuannya	-	-	-	-	-	25 orang	25 orang			
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	Terselenggaranya tata kelola Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan dapat terealisasi	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	DKP		
			Pembangunan dan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Palipi	Pembangunan dan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Palipi	7 unit	9 Unit	5 unit	2 unit	1 unit	1 unit	18 unit		
			Pembangunan Kawasan Pemukiman Nelayan Pelabuhan Perikanan Palipi	Jumlah kawasan pemukiman nelayan yang dibangun	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	4unit		
			Pembangunan Kawasan Pengolahan Ikan Pelabuhan Perikanan Palipi	Jumlah kawasan pengolahan ikan yang terbangun	-	-	1 unit	1 unit	-	1 unit	3 unit		
			Belanja Penunjang Pelabuhan Perikanan Palipi	Jumlah jenis kegiatan penunjang Pelabuhan Perikanan Palipi yang tersedia	-	3 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	6 jenis	23 jenis		
			Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Pelabuhan Perikanan	Jumlah laporan RKL dan RPL yang tersusun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
			Study Kelayakan dan DED pembangunan PPI	Jumlah laporan study kelayakan dan DED pembangunan PPI yang tersusun	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	
			Penyusunan AMDAL pembangunan PPI	Jumlah dokumen AMDAL pembangunan PPI yang tersusun	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	2 dokumen	
			Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan	-	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit I	

		Pendaratan Ikan (PPI)									
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Balai Benih Ikan/Udang Pantai	Persentase pengelolaan Balai Budidaya Ikan/Udang Pantai yang berdaya saing dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan perikanan budidaya setiap tahun	45%	65%	75%	85%	100%	100%	100%	DKP
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Pantai Poniang	Jumlah sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan Pantai Poniang yang terbangun/ direhabilitasi	unit	14 unit	15 unit	11 unit	12 unit	8 unit	60 unit	
		Belanja Penunjang BBI Poniang	Jumlah jenis kegiatan penunjang di BBI Poniang yang tersedia	1 jenis	8 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	
		Peningkatan SDM aparatur dan tenaga teknis BBIP Poniang	Jumlah pegawai BBIP yang mengikuti pelatihan/ TOT/ magang	-	-	2 orang	3 orang	3 orang	3 orang	11 orang	
		Pelatihan Pengelolaan Perbenihan	Jumlah peserta yang terlatih dalam pengelolaan perbenihan	-	-	20 orang	25 orang	25 orang	25 orang	95 orang	
		Temu Lapang	Jumlah laporan temu lapang yang tersusun;	-	-	8 laporan	10 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	
		Temu Usaha	Jumlah laporan temu usaha yang tersusun	-	-	8 laporan	8 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	
		Monitoring dan evaluasi distribusi benih ikan/udang		-	-	10 laporan	12 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	
		Program Pengembangan Balai Benih Budidaya Air Tawar	Persentase pengelolaan Balai Budidaya air tawar yang berdaya saing dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan perikanan budidaya setiap tahun	10%	35%	55%	75%	100%	100%	100%	DKP
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan	Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulbar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DKP
		Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah sarana dan prasarana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang terbangun	27 paket	10 unit	10 unit	12 unit	12 unit	12 unit	56 unit	
		Pengadaan sarana air bersih	Jumlah sarana air bersih yang terbangun/ terbeli	-	300 unit	300 unit	300 unit	300 unit	300 unit	300 unit	
		Sosialisasi PERDA RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya mengenai PERDA RZWP3K	-	30 orang	50 orang	-	-	-	50 orang	

Penyusunan dokumen rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen rencana pengelolaan WP3K yang tersusun	-	10 dokumen	-	10 dokumen	-	-	20 dokumen
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-
Penyusunan dokumen rencana aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci	Jumlah dokumen rencana aksi WP3K yang tersusun	-	-	10 dokumen	-	10 dokumen	-	20 dokumen
Penyusunan profil wilayah pantai dan laut Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen profil wilayah pantai dan laut	-	10 dokumen	-	-	10 dokumen	-	20 dokumen
Pelatihan Pembibitan dan Penanaman Mangrove	Jumlah peserta pelatihan pembibitan dan penanaman mangrove	-	30 orang	-	30 orang	30 orang	50 orang	110 orang
Pembentukan dan Penguohan Badan Konservasi Penyu	Jumlah kegiatan restocking penyu/tukik di perairan umum yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	2 kegiatan
Pelatihan Penangkaran Penyu	Jumlah orang yang terlatih dalam penangkaran penyu	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	60 orang
Workshop Pengembangan Teluk Mandar	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	-	-	30 orang	-	30 orang	-	60 orang
Festival bahari dan pesisir	Jumlah festival yang yang terlaksana	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	5 kegiatan
Mitigasi Bencana	Jumlah orang yang memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana di wilayah	-	50 orang	70 orang	100 orang	70 orang	100 orang	390 orang
Pemetaan Daerah Prioritas Rehabilitasi	Jumlah dokumen pemetaan daerah prioritas rehabilitasi yang tersusun	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	3 dokumen
Rehabilitasi habitat pesisir yakni terumbu karang, padang lamun, mangrove dan vegetasi pesisir lainnya	Jumlah kawasan habitat pesisir yang direhabilitasi	-	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	5 kawasan
Rehabilitasi pelindung pantai	Panjang pelindung pantai yang direhabilitasi	-	meter	meter	Meter	Meter	Meter	meter

		Pembangunan Breakwater	Jumlah/panjang Break Water yang terbangun	-	meter	meter	Meter	Meter	Meter	meter	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah sarana dan prasarana kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terbangun/ tersedia	-	-	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	36 unit	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya hasil pemasaran produk kelautan dan perikanan	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya jumlah produk Kelautan dan Perikanan yang semakin berkualitas, memenuhi standar produk dan memiliki daya saing serta teresap pangsa pasar Nasional dan Internasional	103 ton	103 ton	103 ton	103 ton	103 ton	103 ton	618 ton	DKP
		Pengembangan Pemasaran Sistem Rantai Dingin	Jumlah sarana dan prasarana pemasaran sistem rantai dingin yang tersedia	46 unit	19 unit	29 unit	29 unit	19 unit	19 unit	115 unit	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan di Sentra Produksi	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan yang tersedia	1 unit	8 unit	7 unit	8 unit	7 unit	7 unit	37 unit	
		Diversifikasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan	Jumlah produk olahan kelautan dan perikanan yang di hasilkan oleh UPI						5 produk	5 produk	
		Penanganan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang terverifikasi			5 UPI	5 UPI	5 UPI	5 UPI	25 UPI	
		Penilaian SKP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan)	Jumlah sertifikat Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan		3 sertifikat	3 sertifikat	4 Sertifikat	5 Sertifikat	5 Sertifikat	20 Sertifikat	
		Pengembangan Akses Permodalan Bagi UMKM Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah kegiatan pameran Investasi Permodalan Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi yang terlaksana;	-	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
		Sosialisasi akses permodalan untuk pengolah dan pemasar	Jumlah peserta UMKM yang meningkat pengetahuannya mengenai akses permodalan usaha		50 orang	75 Orang	100 Orang	125 orang	150 Orang	500 Orang	
		Pembuatan Profil UMKM Provinsi Sulawesi Barat	Tersedianya profil UMKM Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	

Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri Sesuai Standar	Jumlah pelaku pemasar yang memiliki pemasaran produk kelautan dan perikanan yang sesuai standar	-	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
Pembinaan dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Supplier	Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang dibina untuk memperoleh SKP	-	1 UPI	2 UPI	2 UPI	2 UPI	3 UPI	10 UPI
Pengembangan kelembagaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai standar Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) dan Good Manufacturing Practices (GMP)	Jumlah peserta usaha pengolahan skala mikro, menengah dan besar yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya dalam pengolahan produk kelautan dan perikanan			30 orang	30 orang		30 orang	90 orang
Pengembangan dan Penguatan Sistem Logistik Ikan Daerah	Jumlah data dan informasi logistik ikan untuk mendukung keberhasilan sistem informasi logistik yang tepat guna		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen
Pembangunan sentra kuliner	Jumlah kawasan sentra kuliner yang terbangun		1 Unit	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	1 unit
Pembangunan Kios Mini Hasil Olahan Produk Perikanan	Jumlah Kios Mini untuk pemasaran hasil pengolahan perikanan yang terbangun;		1 Unit	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	1 unit
Pameran Bazaar Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah pameran tingkat provinsi dan nasional, serta kegiatan bazar/ pasar murah yang terlaksana	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
Lomba masak serba ikan tingkat Prov. Sulawesi Barat	Jumlah lomba masak tingkat provinsi Sulawesi Barat yang terlaksana	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
Lomba masak serba ikan tingkat Nasional	Jumlah lomba masak tingkat nasional yang terlaksana	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
Lomba Inovasi Menu Masakan	Jumlah lomba inovasi menu masakan yang terlaksana	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
Festival hasil olahan produk perikanan dan kelautan	Jumlah kegiatan festival hasil olahan yang terlaksana		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan

		Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Ikan	Jumlah pasar ikan yang dibangun/ direhabilitasi	-	1 paket; 1 paket	1 paket; 1 paket	1 paket; 1 paket	1 paket; 2 paket	1 paket; 2 paket	1 paket; 2 paket	
		Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur, pengolah dan pemasar ikan	Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya mengenai pembinaan mutu produk kelautan dan perikanan	-	-	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	16 orang	
		Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok pemasar dan pengolah ikan	Jumlah laporan hasil verifikasi dan monitoring kelompok pengolah dan pemasar yang tersusun	-	-	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	40 laporan	
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang profesional terhadap produk kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis spasial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	3 kawasan	16 kawasan	16 kawasan	16 kawasan	16 kawasan	16 kawasan	16 kawasan	DKP
		Pengembangan Kawasan Budidaya Tambak	Jumlah kawasan pertambakan yang dikembangkan	-	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	
		Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Jumlah kawasan budidaya air tawar yang dikembangkan	-	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	
		Pengembangan Kawasan Budidaya Laut (Marikultur)	Jumlah Kawasan Budidaya laut (Marikultur) yang dikembangkan	3 kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	

Lampiran 2 Anggaran Program/Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

No	Program/Kegiatan Prioritas DKP Prov. Sulbar	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Rencana Anggaran Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)	Unit kerja Perangkat daerah penanggung jawab
			2018	2019	2020	2021	2022		
			Rp (Juta)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.303.325.000	1.432.977.000	1.548.924.700	1.681.717.170	1.819.788.887	1.819.788.887	DKP
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	12 Bulan	158.800.000	165.000.000	170.000.000	175.000.000	180.000.000	180.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12 Bulan	95.900.000	97.500.000	100.000.000	110.000.000	115.000.000	115.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	199.100.000	200.000.000	215.000.000	230.000.000	245.000.000	245.000.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	28.000.000	30.800.000	33.880.000	37.268.000	40.994.800	40.994.800	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	12 Bulan	44.509.000	48.960.000	53.856.000	59.241.600	65.165.760	65.165.760	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	6.750.000	7.425.000	8.167.500	8.984.250	9.882.675	9.882.675	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.834.000	2.017.000	2.218.700	2.440.570	2.684.627	2.684.627	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	207.000.000	227.700.000	250.470.000	275.517.000	303.068.700	303.068.700	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	51.200.000	56.320.000	61.952.000	68.147.200	74.961.920	74.961.920	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	12 Bulan	351.422.000	386.564.000	425.220.400	467.742.440	514.516.684	514.516.684	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	6 Kabupaten	158.810.000	174.691.000	192.160.100	211.376.110	232.513.721	232.513.721	
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	202.000.000	364.700.000	1.264.170.000	425.587.000	457.645.700	457.645.700	DKP
13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	77.000.000	84.700.000	93.170.000	102.487.000	112.735.700	112.735.700	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan rehabilitasi gedung kantor		25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	
15	Pengadaan peralatan kantor		-	70.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	295.000.000	
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	24 unit	-	40.000.000	340.000.000	40.000.000	40.000.000	460.000.000	

17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	24 unit; 12 Bulan; 12 Bulan; 15 unit; 9 unit	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	610.510.000	
18	Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan	0	-	-	600.000.000	-	-	600.000.000	
19	Pengadaan Meubeler Kantor	1 Paket	-	30.000.000	-	35.000.000	38.500.000	103.500.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Patuh	-	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000	DKP
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	87 Orang	-	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70%	227.000.000	400.000.000	400.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	DKP
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	28 orang; 1 orang; 0	227.000.000	230.000.000	230.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
22	Sosialisasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Bid. Kelautan dan Perikanan	-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
23	Bimtek Peningkatan Sumberdaya Manusia ASN	-	-	75.000.000	75.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
24	Penguatan Kinerja ASN melalui kegiatan <i>Outbond</i>	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	324.750.000	567.725.000	683.497.500	669.347.250	723.681.975	723.681.975	DKP
25	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	1 Laporan	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
26	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	1 Laporan	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
27	Penyusunan LKPJ, LAKIP dan LPPD SKPD	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	15.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
28	Penyusunan RKA/DPA-SKPD.	1 Dokumen	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
29	Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD.	1 Dokumen	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
30	Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Sistem Informasi, Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	60 Bulan; 3 Dokumen;	205.000.000	225.500.000	248.050.000	272.855.000	300.140.500	300.140.500	
31	Rapat Koordinasi Forum SKPD DKP Se-Prov. Sulbar	1 Kegiatan	74.750.000	82.225.000	90.447.500	99.492.250	109.441.475	109.441.475	
32	Penyusunan RENJA Pokok dan RENJA Perubahan	1 Dokumen	-	14.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
33	Penyusunan RENJA 2019 dan RENJA Perubahan TA. 2018	1 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	
34	Forum Musyawarah Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	65.000.000	-	-	65.000.000	
35	Kegiatan Forum Petugas Statistik DKP Prov. Sulawesi Barat			100.000.000				100.000.000	

36	Validasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan Prov Sul-Bar	-	-	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	133.100.000	
37	Pengembangan data/ informasi kelautan dan perikanan		-	100.000.000	110.000.000	115.000.000	120.000.000	120.000.000	
VI	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100%	504.000.000	580.000.000	740.000.000	900.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	DKP
38	Pengawasan Sumberdaya Kelautan	150 hari	350.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	760.000.000	760.000.000	
39	Pengawasan Sumberdaya Perikanan	6 dokumen	-	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
40	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4 unit	100.000.000	100.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	
41	Pembinaan POKMASWAS	40 kelompok	25.000.000	-	35.000.000	-	50.000.000	50.000.000	
42	Verifikasi, monitoring dan evaluasi POKMASWAS				-				
43	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	
44	Sosialisasi dan deseminasi aturan perundang-undangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				25.000.000				
45	Konservasi, pemantauan dan karantina sumber daya kelautan dan perikanan				-				
46	Pembinaan konservasi dan pengendalian lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DKP
47	Bimbingan Teknis Operasi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	-	-	-	50.000.000	-	-	-	DKP
48	Peningkatan SDM Aparat pengawas dan POKMASWAS	-	29.000.000	-	-	50.000.000	-	-	
49	Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Prov. Sulbar	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	
50	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	6 laporan	-	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
51	Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		-	-	25.000.000	-	25.000.000	50.000.000	DKP
52	Temu Teknis Pengawas Perikanan Tingkat Sulawesi Barat	-	-	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DKP

VII	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	4%	2.657.000.000	2.816.000.000	3.014.000.000	3.255.000.000	3.515.000.000	3.515.000.000	DKP
53	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	9 unit	2.197.000.000	2.566.000.000	2.440.000.000	2.390.000.000	2.625.000.000	2.625.000.000	
54	Temu Lapang Budidaya Perikanan	6 laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	375.000.000	380.000.000	380.000.000	
55	Pengembangan Budidaya Air Payau, Air Laut dan Air Tawar	18 unit	-	-	-	-	-	-	
56	Sertifikasi bidang tanah Pembudidaya		100.000.000	-	100.000.000	-	-	200.000.000	
57	Sertifikasi CBIB dan pengawasan CBIB	400 sertifikat	100.000.000	-	100.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	
58	Pengelolaan perizinan pembudidayaan ikan	-	10.000.000	-	12.000.000	20.000.000	25.000.000	-	
59	Pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	
60	Pemantauan dan analisis kesehatan ikan dan lingkungan								
61	Pembinaan, pendampingan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan								
62	Pengembangan SDM aparatur dan pembudidaya	-	-	-	-	-	-	-	
63	Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok perikanan budidaya			100.000.000	100.000.000	150.000.000	165.000.000		
VIII	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7%	3.172.000.000	3.426.000.000	3.700.000.000	4.033.000.000	4.436.000.000	4.436.000.000	DKP
64	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	17 unit	2.500.000.000	2.750.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	
65	Replacemant sarana perikanan tangkap	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
66	Inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan		50.000.000	60.000.000			65.000.000	65.000.000	
67	Pengenalan dan penguasaan karakteristik daerah penangkapan ikan		50.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
68	Rakor Forum Kenelayanan se Prov. Sulawesi Barat	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	65.000.000	65.000.000	
69	Festival Nelayan se Sulawesi Barat	-	-	100.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	
70	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			50.000.000				50.000.000	
71	Cek Fisik Penerbitan SIPI, SIKPI dan Penerbitan Buku Kapal	74 kapal	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	425.000.000	
72	Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal dan Alat Penangkapan Ikan	20 orang	50.000.000	46.000.000	50.000.000	53.000.000	65.000.000	65.000.000	

73	Pelatihan keahlian BST, ANKAPIN, dan ATKAPIN bagi nelayan	-	50.000.000	-	-	50.000.000	75.000.000	175.000.000	
74	Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan bagi masyarakat nelayan	-	50.000.000	-	-	50.000.000	75.000.000	175.000.000	
75	Pelatihan Pembukuan Kegiatan Nelayan	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	100.000.000	
76	Asuransi Nelayan Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	
77	Identifikasi dan sertifikasi bidang tanah nelayan	-	37.000.000	35.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	
78	Pendampingan dan pembinaan Koperasi dan KUB	-	35.000.000	35.000.000	50.000.000	50.000.000	56.000.000	56.000.000	
79	<i>Sulbar Command Center</i> untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	70.000.000	75.000.000	295.000.000	
80	Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok perikanan tangkap	-	-	-	-	50.000.000	60.000.000	110.000.000	
81	Identifikasi dan Pengembangan Kampung Nelayan Terintegrasi		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	
82	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Nelayan	-	-	-	-	50.000.000	60.000.000	110.000.000	
83	Pelatihan Keterampilan Keluarga bagi Kelompok Perempuan Nelayan	-	-	-	50.000.000	-	60.000.000	110.000.000	
84	Pemberdayaan Pengusaha/ Eksportir Lokal Ikan di Desa Nelayan	-	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000	
IX	Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Unit	1.195.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	2.100.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	DKP
85	Pembangunan dan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Palipi	7 unit	1.000.000.000	650.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
86	Pembangunan Kawasan Pemukiman Nelayan Pelabuhan Perikanan Palipi	-	-	250.000.000	200.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
87	Pembangunan Kawasan Pengolahan Ikan Pelabuhan Perikanan Palipi	-	-	230.000.000	275.000.000	-	155.000.000	155.000.000	
88	Belanja Penunjang Pelabuhan Perikanan Palipi	-	55.000.000	65.000.000	85.000.000	85.000.000	100.000.000	100.000.000	
89	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Pelabuhan Perikanan	2 laporan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	
90	Study Kelayakan dan DED pembangunan PPI	-	-	265.000.000	-	-	-	-	
91	Penyusunan AMDAL pembangunan PPI	-	100.000.000	-	450.000.000	-	-	-	
92	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	-	-	-	-0	825.000.000-	1.250.000.000	1.250.000.000	

X	Program Pengembangan Balai Benih Ikan/Udang Pantai	45%	707.000.000	880.000.000	1.000.000.000	1.150.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	DKP
93	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Pantai Poniang	Unit	400.000.000	400.000.000	475.000.000	570.000.000	700.000.000	700.000.000	
94	Belanja PenunjangBBI Poniang	1 jenis	307.000.000	325.000.000	350.000.000	375.000.000	395.000.000	395.000.000	
95	Peningkatan SDM aparatur dan tenaga teknis BBIP Poniang	-	-	40.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
96	Pelatihan Pengelolaan Perbenihan	-	-	35.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
97	Temu Lapang	-	-	25.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
98	Temu Usaha	-	-	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
99	Monitoring dan evaluasi distribusi benih ikan/udang	-	-	30.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
XI	Program Pengembangan Balai Benih Budidaya Air Tawar	10%	324.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000	DKP
XII	Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	100%	2.030.000.000	2.100.000.000	2.300.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	DKP
100	Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	27 paket	620.000.000	300.000.000	400.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	
101	Pengadaan sarana air bersih	-	310.000.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	600.000.000	600.000.000	
102	Sosialisasi PERDA RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat	-	100.000.000	150.000.000	-	-	-	150.000.000	
103	Penyusunan dokumen rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	250.000.000	-	200.000.000	-	-	450.000.000	
104	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dokumen	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	
105	Penyusunan dokumen rencana aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	400.000.000	
106	Penyusunan profil wilayah pantai dan laut Provinsi Sulawesi Barat	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	200.000.000	
107	Pelatihan Pembibitan dan Penanaman Mangrove	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	150.000.000	450.000.000	
108	Pembentukan dan Pengukuhan Badan Konservasi Penyu	1 kegiatan	50.000.000	-	70.000.000	-	-	120.000.000	
109	Pelatihan Penangkaran Penyu	-	-	100.000.000	-	150.000.000	-	250.000.000	
110	Workshop Pengembangan Teluk Mandar	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	200.000.000	
111	Festival bahari dan pesisir	-	100.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	
112	Mitigasi Bencana	-	100.000.000	150.000.000	200.000.000	150.000.000	200.000.000	750.000.000	

113	Pemetaan Daerah Prioritas Rehabilitasi	-	200.000.000	-	150.000.000	-	200.000.000	550.000.000	
114	Rehabilitasi habitat pesisir yakni terumbu karang, padang lamun, mangrove dan vegetasi pesisir lainnya		100.000.000	200.000.000	250.000.000	200.000.000	300.000.000	810.000.000	
115	Rehabilitasi pelindung pantai	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	
116	Pembangunan Breakwater	-	-	-	-	-	-	-	
117	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	-	-	450.000.000	530.000.000	530.000.000	550.000.000	2.080.000.000	
XIII	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	103 ton	765.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	4.565.000.000	DKP
118	Pengembangan Pemasaran Sistem Rantai Dingin	46unit	313.000.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	65.482.000.000	
119	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan di Sentra Produksi	1 unit	-	75.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	350.000.000	
120	Diversifikasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan	Jenis	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	
121	Penanganan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan		-	-	-	-	-	-	
122	Penilaian SKP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan)		-	-	-	-	-	-	
123	Pengembangan Akses Permodalan Bagi UMKM Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		-	-	-	-	-	-	
124	Sosialisasi akses permodalan untuk pengolah dan pemasar		-	50.000.000		50.000.000	-	100.000.000	
125	Pembuatan Profil UMKM Provinsi Sulawesi Barat		-		50.000.000	-	-	50.000.000	
126	Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri Sesuai Standar		202.000.000	-	-	-	-	202.000.000	
127	Pembinaan dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Supplier		-	-	-	75.000.000	-	75.000.000	
128	Pengembangan kelembagaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Good Manufacturing Practices (GMP)				50.000.000		50.000.000		
129	Pengembangan dan Penguatan Sistem Logistik Ikan Daerah		-		50.000.000	50.000.000		100.000.000	
130	Pembangunan sentra kuliner		-	-	-	-	-	-	
131	Pembangunan Kios Mini Hasil Olahan Produk Perikanan			-	-		150.000.000	150.000.000	
132	Pameran Bazaar Tingkat Provinsi dan Nasional	3 kegiatan	250.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	550.000.000	
133	Lomba masak serba ikan tingkat Prov. Sulawesi Barat	1 Kegiatan	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	

134	Lomba masak serba ikan tingkat Nasional	1 Kegiatan	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	
135	Lomba Inovasi Menu Masakan	1 Kegiatan	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	
136	Festival hasil olahan produk perikanan dan kelautan		-	-	-	-	-	-	
137	Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Ikan	-	-	-	-	-	-	-	
138	Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur, pengolah dan pemasar ikan	0 Kegiatan	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	180.000.000	
139	Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok pemasar dan pengolah ikan	Laporan	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	120.000.000	
XIV	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	16 Kawasan	150.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000	DKP
147	Pengembangan Kawasan Budidaya Tambak	-	50.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	-	
148	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	-	50.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	-	
149	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut (Marikultur)	3 kawasn	50.000.000	75.000.000	125.000.000	200.000.000	250.000.000	-	
JUMLAH			13.561.075.000	15.462.402.000	18.100.592.200	19.044.651.420	21.297.116.562	24.762.116.562	

**REKAPITULASI PAGU PROGRAM RUTIN SKPD PROVINSI SULAWESI BARAT
PADA RPJMD 2017 - 2022**

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.275.362	1.266.590.961	1.489.302.922	1.514.757.682	1.594.615.644
2	DINAS KESEHATAN + RSUD	7.680.867.716	6.851.854.810	7.722.272.936	7.746.905.398	8.051.749.888
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.171.477.034	1.200.702.054	1.321.349.222	1.289.155.978	1.298.293.760
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	430.400.662	962.287.288	1.739.457.310	1.677.384.560	1.611.478.658
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.266.920.751	1.116.023.534	1.215.082.743	1.163.922.625	1.200.338.065
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	260.555.616	1.114.972.538	1.171.149.478	1.456.360.990	1.404.833.568
7	DINAS SOSIAL	624.365.598	632.430.853	944.094.444	1.023.026.767	982.831.153
8	DINAS TENAGA KERJA	832.698.541	1.057.717.687	1.193.044.298	1.215.066.554	1.280.641.520
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PP DAN KB	886.542.158	222.866.188	227.074.183	212.061.713	220.368.283
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	714.813.472	359.547.806	458.175.874	436.653.429	442.330.962
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	506.584.663	765.027.466	799.192.863	742.079.671	791.503.652
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	704.813.611	652.497.570	662.487.477	538.090.742	695.132.012
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	862.460.390	960.133.912	929.604.286	937.216.396	886.199.376
14	DINAS PERHUBUNGAN	1.101.061.766	1.062.483.833	1.165.430.014	1.048.596.509	1.057.766.050
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	504.400.017	669.704.555	824.087.848	913.967.135	844.460.371
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	560.345.961	933.739.820	988.206.408	929.439.938	904.309.974
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.116.385.952	1.270.972.148	1.568.384.077	1.720.060.068	1.952.565.483
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	571.174.208	61.715.475	65.109.962	60.812.599	58.764.875
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	953.708.952	935.240.578	978.463.568	892.688.652	857.614.137
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	825.305.571	875.612.736	988.730.036	996.780.011	1.036.237.465
21	DINAS PARIWISATA	691.488.066	837.130.694	916.007.794	912.781.704	913.930.476
22	DINAS PERTANIAN	2.877.553.497	3.193.242.976	3.836.227.238	4.096.388.251	4.525.753.536
23	DINAS KEHUTANAN	1.116.385.952	1.270.972.148	1.568.384.077	1.720.060.068	1.952.565.483
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.089.030.380	1.050.873.991	1.097.805.021	1.019.351.932	979.300.705
25	DINAS TRANSMIGRASI	949.846.244	1.008.223.099	1.158.574.318	1.183.356.281	1.250.461.884
26	SEKRETARIAT DAERAH BIRO TATA PEMERINTAHAN	774.976.384	832.668.848	1.000.307.960	1.072.334.761	1.109.698.369
27	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	498.099.370	509.672.052	551.551.592	540.283.789	2.368.298.506
28	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	21.184.725.339	23.701.583.019	28.474.084.073	30.405.107.337	33.592.033.778
29	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM	823.200.078	904.345.567	1.117.082.676	1.155.795.015	1.224.268.238
30	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADM. PEMBANGUNAN	1.161.978.572	1.121.266.294	1.253.366.762	1.280.176.340	1.352.864.805
31	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	572.914.326	567.415.739	957.499.437	1.185.430.785	886.199.376
32	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	1.047.320.922	1.165.643.356	1.428.840.024	1.345.979.603	1.196.018.961
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	822.566.847	873.182.308	1.003.459.410	1.024.804.913	1.083.050.321
34	SEKRETARIAT DPRD	20.273.971.626	17.211.111.322	18.214.011.329	18.413.720.760	16.038.891.060
35	INSPEKTORAT DAERAH	1.096.697.413	1.713.979.267	1.950.107.186	1.929.288.602	1.853.485.170
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.228.771.760	1.301.441.873	1.382.772.811	1.393.054.245	1.476.113.881
37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.294.036.354	3.191.229.310	3.437.885.488	3.274.510.152	3.133.841.334
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	830.695.315	1.026.434.858	1.110.774.914	1.085.120.201	1.080.097.376
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.165.777.957	1.481.171.388	1.702.433.998	1.739.026.961	1.837.541.212
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	830.805.597	897.290.078	1.102.123.941	1.174.400.883	1.320.550.632
TOTAL		82.956.000.000	86.831.000.000	99.714.000.000	102.466.000.000	106.347.000.000
RPJMD		82.956.000.000	86.831.000.000	99.714.000.000	102.466.000.000	106.347.000.000

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59.155.016	1.949.841.344	2.682.248.877	2.505.202.921	2.533.909.452
2	DINAS KESEHATAN + RSUD	891.550.427	1.222.687.408	1.624.995.875	1.469.369.547	1.585.907.183
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	424.441.342	583.607.685	792.903.038	726.787.282	789.274.161
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	370.768.836	437.033.405	462.456.703	356.968.213	361.058.628
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.061.097.600	618.076.174	242.159.146	562.938.872	801.857.054
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.107.004.115	4.454.378.933	7.136.547.756	6.202.322.705	6.652.505.222
7	DINAS SOSIAL	203.157.258	209.776.034	375.010.345	3.940.929.074	375.500.973
8	DINAS TENAGA KERJA	297.553.559	367.108.060	513.377.390	484.877.063	561.139.267
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PP DAN KB	244.370.136	264.909.479	357.352.907	341.618.580	422.438.595
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	95.877.229	47.737.495	76.515.564	70.322.738	77.627.605
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	138.516.312	294.157.099	367.863.286	312.347.187	324.952.765
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	484.860.173	169.022.737	211.374.328	179.474.765	181.531.324
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	345.093.726	596.382.508	575.968.803	455.134.472	366.474.507
14	DINAS PERHUBUNGAN	261.641.923	314.327.872	266.963.642	423.007.333	319.536.886
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	504.370.384	568.143.426	775.666.015	740.709.042	796.134.275
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	181.268.260	449.808.227	575.127.972	495.471.880	505.121.021
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	219.231.990	385.934.114	452.366.738	438.713.934	527.506.656
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	273.612.468	121.024.635	92.491.341	135.647.921	191.361.073
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	393.317.923	352.988.519	273.269.870	160.635.696	178.598.011
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	69.087.148	122.604.679	531.476.264	151.921.031	165.236.929
21	DINAS PARIWISATA	85.503.896	387.009.889	538.131.436	449.779.949	537.977.356
22	DINAS PERTANIAN	1.828.348.627	2.066.722.903	2.972.262.622	2.902.259.021	3.375.842.930
23	DINAS KEHUTANAN	219.231.990	385.934.114	452.366.738	438.713.934	527.506.656
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	738.753.665	369.797.496	817.707.534	392.665.035	397.164.491
25	DINAS TRANSMIGRASI	309.524.105	391.649.167	483.477.462	464.058.677	496.455.614
26	SEKRETARIAT DAERAH BIRO TATA PEMERINTAHAN	75.390.495	89.386.778	168.603.306	173.768.557	182.865.363
27	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	148.708.377	149.936.076	190.027.663	163.491.442	879.856.550
28	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	11.975.929.138	17.403.376.854	25.028.710.615	24.439.227.229	28.427.161.175
29	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM	530.124.157	487.460.336	685.276.751	642.542.784	686.011.393
30	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADM. PEMBANGUNAN	256.511.689	252.134.657	346.842.527	323.948.654	360.426.775
31	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.100.779	18.994.144	42.041.518	71.393.643	366.474.507
32	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	404.938.758	722.551.900	726.585.906	634.136.182	645.701.003
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	199.053.071	467.289.564	619.691.982	276.650.365	524.257.128
34	SEKRETARIAT DPRD	3.837.176.484	1.982.114.580	2.604.892.483	3.889.525.652	2.128.801.671
35	INSPEKTORAT DAERAH	99.622.300	168.089.771	336.332.148	285.574.571	288.846.902
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	245.454.325	549.653.551	771.461.863	410.513.445	436.880.940
37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	489.413.700	1.421.030.924	1.212.704.416	916.205.611	1.157.656.291
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	58.614.631	134.471.817	168.166.074	142.787.285	144.423.451
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	51.302.338	26.558.184	919.448.008	309.134.473	383.444.263
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	239.321.650	263.287.461	387.133.086	377.223.236	446.573.955
TOTAL		35.436.000.000	41.267.000.000	57.858.000.000	57.858.000.000	60.112.000.000
RPJMD		35.436.000.000	41.267.000.000	57.858.000.000	57.858.000.000	60.112.000.000

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	125.965.826	1.122.611.107	1.797.819.868	1.952.477.821	2.418.758.943
2	DINAS KESEHATAN + RSUD	1.517.315.009	769.972.874	1.217.688.441	1.306.481.626	1.599.617.757
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.121.786	140.656.568	214.392.423	213.567.093	240.518.302
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	68.237.175	82.544.934	120.175.125	118.648.385	133.621.279
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	174.687.169	99.978.424	154.304.860	157.327.758	267.242.558
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	1.251.777.421	1.822.431.734	1.799.279.027	2.026.339.971
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-
8	DINAS TENAGA KERJA	81.884.611	142.637.647	228.428.877	248.079.535	307.328.942
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PP DAN KB	117.013.108	66.035.947	96.140.100	94.918.708	106.897.023
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	24.237.845	33.017.974	43.263.045	80.680.902	101.552.172
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	170.592.939	122.166.503	144.210.150	166.107.739	213.794.046
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	180.828.515	87.497.630	127.385.632	125.767.288	141.638.556
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	120.111.076	62.734.150	81.290.300	56.951.225	85.517.619
14	DINAS PERHUBUNGAN	245.653.832	118.864.705	181.704.789	179.396.358	202.035.374
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	281.410.112	161.589.964	249.964.260	294.247.994	304.656.516
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	290.690.367	197.117.303	296.592.208	311.807.955	373.605.096
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	103.720.507	231.786.176	152.862.759	205.024.409	173.173.178
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	47.766.023	79.243.137	115.368.120	113.902.449	128.276.428
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	107.473.551	52.003.309	75.710.329	74.748.482	84.181.406
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	29.716.176	48.070.050	52.205.289	64.138.214
21	DINAS PARIWISATA	272.948.702	132.071.895	192.280.200	189.837.416	213.794.046
22	DINAS PERTANIAN	513.447.897	285.708.489	478.348.913	543.112.507	703.399.516
23	DINAS KEHUTANAN	103.720.507	231.786.176	152.862.759	205.024.409	173.173.178
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	232.006.397	-	67.298.070	66.443.096	74.827.916
25	DINAS TRANSMIGRASI	174.687.169	100.044.460	154.304.860	157.327.758	267.242.558
26	SEKRETARIAT DAERAH BIRO TATA PEMERINTAHAN	266.752.766	155.745.782	241.633.720	266.712.077	309.948.988
27	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	-	-	-	-	-
28	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	321.833.814	179.084.867	299.834.004	340.428.549	440.897.470
29	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM	136.474.351	66.035.947	105.754.110	104.410.579	128.276.428
30	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADM. PEMBANGUNAN	204.711.526	99.053.921	158.631.165	172.277.455	213.419.907
31	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	5.613.056	96.140.100	142.378.062	85.517.619
32	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	108.959.313	-	148.547.778	133.621.279
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	252.477.549	94.431.405	144.210.150	166.107.739	125.069.517
34	SEKRETARIAT DPRD	682.371.754	792.431.370	1.826.661.898	1.898.374.158	1.282.764.278
35	INSPEKTORAT DAERAH	-	66.035.947	96.140.100	94.918.708	106.897.023
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	274.108.734	171.693.463	288.420.300	303.739.865	342.070.474
37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-	283.129.125	450.368.298	483.990.492	650.468.386
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	142.219.921	306.418.683	515.516.291	578.243.174	753.923.308
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	155.580.760	106.317.875	148.055.754	135.733.752	69.483.065
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	272.948.702	158.486.274	230.736.240	265.772.382	299.311.665
TOTAL		7.814.000.000	8.195.000.000	12.815.000.000	13.815.000.000	15.347.000.000
RPJMD		7.814.000.000	8.195.000.000	12.815.000.000	13.815.000.000	15.347.000.000

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	222.480.411	284.828.154	331.801.559	370.092.651
2	DINAS KESEHATAN + RSUD	646.943.342	620.961.961	783.327.813	900.173.258	991.543.962
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.165.897	111.240.206	155.360.812	191.951.315	222.444.869
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	184.055.497	422.712.782	543.762.840	603.275.562	611.723.390
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	907.065.254	743.084.574	621.443.246	658.118.794	1.153.932.758
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.426.957.857	2.278.199.412	2.910.425.869	3.082.189.687	3.125.350.409
7	DINAS SOSIAL	5.884.362	7.119.373	12.428.865	15.356.105	15.571.141
8	DINAS TENAGA KERJA	55.165.897	66.744.123	77.680.406	82.264.849	83.416.826
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PP DAN KB	92.862.593	133.488.247	181.254.280	219.372.931	211.322.626
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	40.454.991	15.573.629	18.125.428	5.484.323	19.463.926
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	73.554.529	200.232.370	233.041.217	246.794.548	278.056.086
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	33.099.538	40.046.474	46.608.243	49.358.910	50.050.096
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.033.179	102.340.989	15.536.081	126.139.436	16.683.365
14	DINAS PERHUBUNGAN	158.142.237	191.333.154	222.683.830	235.825.901	239.128.234
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	882.654.345	1.459.471.499	2.045.584.018	2.467.945.479	2.863.977.688
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	232.800.083	106.790.597	132.056.690	150.818.890	164.609.203
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	110.331.793	204.681.978	301.399.974	345.512.367	361.472.912
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22.066.359	57.844.907	51.786.937	54.843.233	55.611.217
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	165.497.690	222.480.411	181.254.280	191.951.315	194.639.260
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.484.390	177.984.329	207.147.749	233.083.740	236.347.673
21	DINAS PARIWISATA	183.886.322	355.968.658	414.295.497	438.745.863	444.889.738
22	DINAS PERTANIAN	1.837.333.284	255.639.782	342.156.294	416.701.626	485.917.470
23	DINAS KEHUTANAN	110.331.793	204.681.978	301.399.974	345.512.367	361.472.912
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	216.985.860	240.278.844	72.501.712	296.153.458	300.300.573
25	DINAS TRANSMIGRASI	129.823.743	175.314.564	247.023.690	219.372.931	228.005.991
26	SEKRETARIAT DAERAH BIRO TATA PEMERINTAHAN	232.432.311	303.249.700	409.339.487	546.113.557	582.956.819
27	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	-	-	-	-	-
28	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	1.013.649.076	423.602.703	328.743.477	400.366.569	466.868.959
29	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM	44.132.717	53.395.299	129.467.343	137.108.082	139.028.043
30	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADM. PEMBANGUNAN	55.165.897	66.744.123	85.448.446	99.540.468	111.027.795
31	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.677.726	8.899.216	25.893.469	27.421.616	16.683.365
32	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	110.331.793	120.584.383	1.408.604.691	145.608.783	131.242.473
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	51.488.170	191.333.154	184.361.496	284.087.946	239.684.346
34	SEKRETARIAT DPRD	1.783.873.853	2.158.273.572	2.563.701.967	2.797.273.608	2.697.410.970
35	INSPEKTORAT DAERAH	180.941.566	200.115.791	621.443.246	701.993.381	711.823.581
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.081.280	44.167.701	66.825.864	92.000.620	121.275.830
37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	228.804.234	310.137.693	362.011.406	384.517.313	391.082.113
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	160.840.543	217.801.410	298.045.206	362.219.608	429.890.731
TOTAL		11.559.000.000	12.715.000.000	16.887.000.000	17.887.000.000	19.125.000.000
RPJMD		11.559.000.000	12.715.000.000	16.887.000.000	17.887.000.000	19.125.000.000

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	129.250.946	284.034.734	381.733.638	484.913.886	565.199.251
2	DINAS KESEHATAN + RSUD	27.977.306	60.434.045	75.774.638	89.966.019	100.647.854
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	91.803.857	155.120.335	201.010.714	239.841.666	266.394.967
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.749.913	238.856.893	323.887.696	439.581.189	473.954.235
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	63.603.112	32.794.997	52.423.060	74.420.324	95.608.010
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.538.147	15.850.915	47.414.487	55.526.045	60.470.023
7	DINAS SOSIAL	7.201.622	12.243.465	21.369.910	28.842.696	30.561.877
8	DINAS TENAGA KERJA	55.661.136	111.852.802	143.715.315	154.488.881	176.389.423
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PP DAN KB	12.289.871	19.349.048	23.640.463	27.300.305	28.927.552
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.057.439	9.368.437	11.619.888	13.573.033	14.382.060
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	31.633.294	62.857.077	76.798.113	88.687.433	131.563.158
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.355.671	3.826.083	4.674.668	5.398.365	5.720.137
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.720.915	68.869.493	84.144.020	97.170.579	111.134.097
14	DINAS PERHUBUNGAN	16.287.781	27.777.362	33.938.088	39.192.133	43.604.607
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	59.100.415	101.664.490	140.907.843	170.819.708	215.730.893
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	41.325.196	108.879.389	135.565.365	159.637.379	172.911.580
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	137.840.395	231.641.994	286.223.230	363.078.638	462.187.096
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.278.500	9.729.182	11.887.012	13.727.272	14.545.492
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14.470.549	28.968.914	35.393.913	40.873.339	59.652.861
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.278.208	43.726.662	53.424.775	65.551.581	69.458.810
21	DINAS PARIWISATA	28.133.440	45.694.362	55.828.889	64.471.908	68.314.783
22	DINAS PERTANIAN	97.617.316	182.332.749	256.187.955	340.226.586	414.581.825
23	DINAS KEHUTANAN	137.840.395	231.641.994	286.223.230	363.078.638	462.187.096
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	19.181.891	31.155.247	51.421.346	43.958.119	46.578.261
25	DINAS TRANSMIGRASI	59.473.957	111.612.306	157.870.209	192.490.289	216.874.921
26	SEKRETARIAT DAERAH BIRO TATA PEMERINTAHAN	9.611.137	17.803.311	23.205.051	32.471.940	38.301.059
27	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	9.520.948	16.338.467	20.362.853	23.977.997	121.152.509
28	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	130.334.230	271.636.242	381.664.637	506.863.823	617.637.002
29	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM	16.826.220	43.726.662	73.459.065	100.255.359	122.574.371
30	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADM. PEMBANGUNAN	13.864.805	22.519.231	30.265.135	38.445.617	44.810.902
31	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.939.944	10.931.666	20.034.290	30.847.803	111.134.097
32	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	24.298.155	34.150.523	44.410.679	50.849.672	56.168.643
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.970.988	7.870.799	9.750.021	12.339.121	13.728.330
34	SEKRETARIAT DPRD	20.191.464	32.794.997	46.746.678	61.695.605	73.544.623
35	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.340.872	28.154.505	43.089.084	61.896.116	71.303.963
37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	40.128.246	162.214.547	202.155.862	238.121.190	257.360.794
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.780.359	16.884.668	23.834.996	31.226.691	37.010.351
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.086.451	9.182.599	5.075.354	6.323.800	7.354.462
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	29.434.907	53.508.805	76.867.830	101.869.259	126.338.027
TOTAL		1.416.000.000	2.958.000.000	3.954.000.000	4.954.000.000	6.006.000.000
RPJMD		1.416.000.000	2.958.000.000	3.954.000.000	4.954.000.000	6.006.000.000